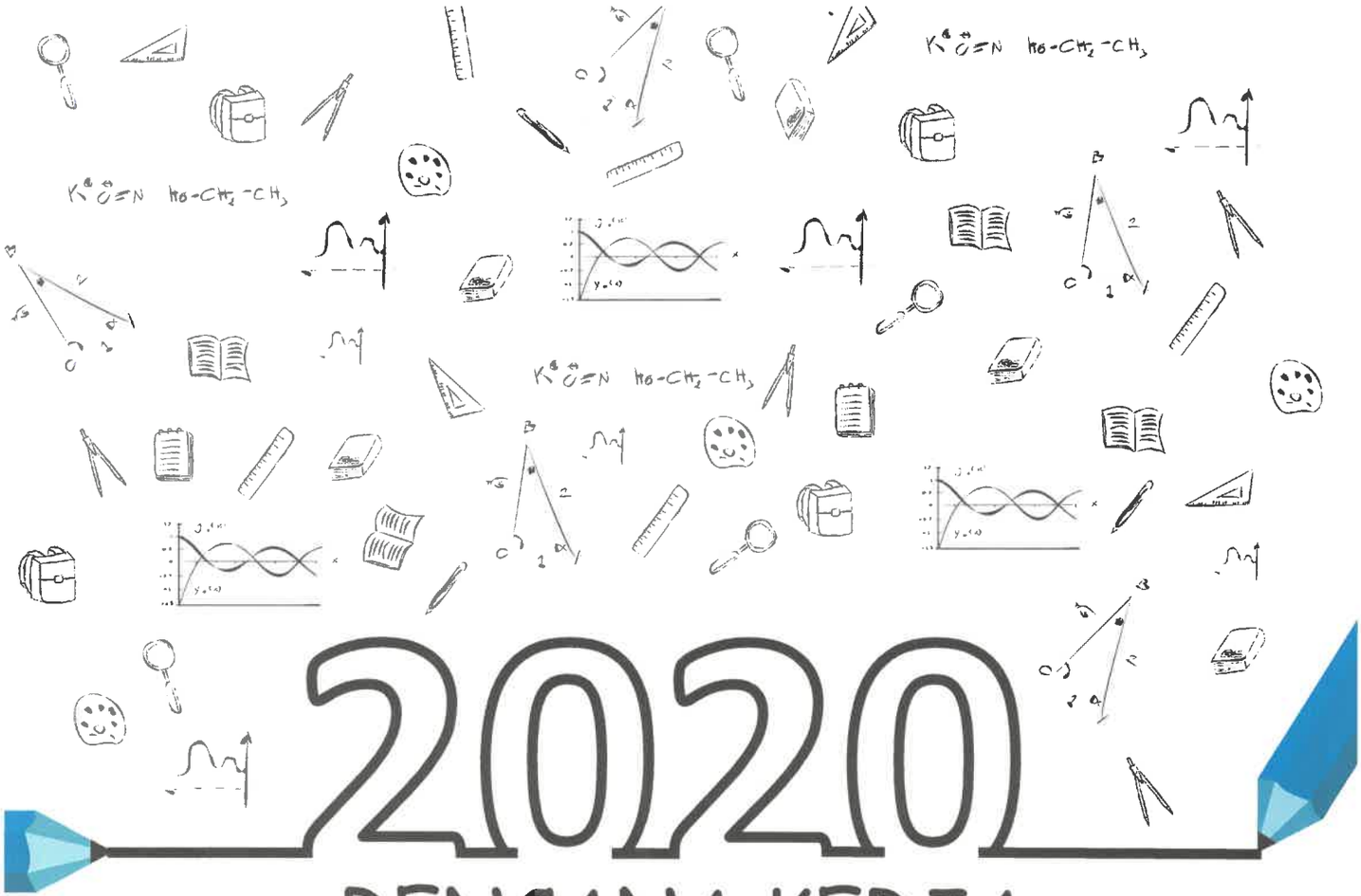

2020

RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RENCANA KERJA TAHUN 2020

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

URUS IZIN SENDIRI ITU MUDAH

SETIA #MelayaniJakarta

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C 22

1500164 pelayanan.jakarta.go.id /PelayananJakarta @layananjakarta @layananjakarta /layananjakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dapat disusun dengan baik.

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun dengan memedomani Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Secara substansi, dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya urusan Penanaman Modal. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Jakarta,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Ir. Benni Aguscandra M.Si.
NIP 196908081997031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
EXECUTIVE SUMMARY ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. LATAR BELAKANG 1
B. DASAR HUKUM 2
C. MAKSUD DAN TUJUAN 5
D. SISTEMATIKA PENULISAN 6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2018 ..... **9**
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS 9
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN 26
C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 37
D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 47
E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 52
F. PENELAAHAN HASIL RESES DPRD 52
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **61**
A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 61
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 66
C. PROGRAM DAN KEGIATAN 68
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **81**
BAB V PENUTUP **92**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Capaian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 9

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Tahun 2019 15

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 26

Tabel 2. 4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... 37

Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta 50

Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 52

Tabel 2. 7 Hasil Reses Dan Rencana Tindaklanjut 53

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)..... 66

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 70

EXECUTIVE SUMMARY

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta.

Terdapat 4 (empat) Program dan tujuh puluh sembilan (79) kegiatan yang direncanakan di tingkat Dinas maupun UP Kota/Kab yang termuat dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020. Adapun Program dan kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian target kinerja yakni jumlah realisasi Investasi Provinsi DKI Jakarta sebesar 115,9 Triliun, pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 90, prosentase layanan online sebesar 100 persen, nilai indeks tingkat kepuasan layanan kantor sebesar 4 dan nilai indeks kepuasan layanan kendaraan dinas operasional sebesar 4.

Jumlah anggaran Belanja Langsung yang dimajukan pada tahun 2020 untuk mencapai target tersebut adalah sebesar Rp. 221,354,513,193,-. Dengan alokasi di tingkat Dinas sebesar Rp. 189,432,257,907,- yang terbagi kedalam 4 (empat) Program yakni Program Peningkatan Penanaman Modal; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Program Peningkatan Dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal; Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal. Untuk tingkat Unit Pelaksanan PTSP Kota/Kabupaten dialokasikan anggaran sebesar Rp. 31,922,255,286,-

PENDAHULUAN

1

Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; Sistematika Penulisan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang didalamnya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam kedudukannya Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu sebagai salah satu produk perencanaan daerah, Rencana Keja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis sebagai penghubung antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta selaku Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas dan fungsi menyusun rencana kerja. Dalam menyusun

Rencana Kerja harus memperhatikan kesesuaian capaian antar kegiatan dalam satu program maupun dengan program lain, selain itu harus ada keselarasan program dengan isu strategis daerah yang termuat dalam rancangan awal RKPD Provinsi DKI Jakarta.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2020, untuk itu perlu dilalui mekanisme perencanaan seperti Rapat Kordinasi Teknis, Forum SKPD, Forum Asisten, Forum Sekda, Forum Tematik Lintas Sektor dan pelaksanaan Musrenbang guna merumuskan perencanaan tahun 2020. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2020 dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2022 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
29. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
34. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;
36. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016;

37. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
38. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
39. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 405 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Sistem Informasi dan Kearsipan;
40. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
41. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Informasi, Promosi dan Kerjasama Investasi.
42. Keputusan Gubernur Nomor 1959 Tahun 2018 tentang Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk Rukun Warga Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
43. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
44. Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
45. Instruksi Gubernur Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 adalah menyediakan informasi mengenai rencana kerja tahun 2020 serta sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan penanaman modal untuk kurun waktu satu tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2022 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 adalah:

1. Mewujudkan sinkronisasi, sinergisitas dan keberlanjutan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dengan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal di DKI Jakarta yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
2. Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan penanaman modal, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas;
3. Menumbuhkembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi,
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sesuai dengan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2020, tema pembangunan pada tahun 2020 adalah **"Memacu Pertumbuhan Berkualitas"**. Berkualitas di sini dimaknai dengan hasil pertumbuhan dan pembangunan Provinsi DKI Jakarta secara merata dapat dinikmati oleh seluruh warga Jakarta.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta proses penyusunan Renja.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019 ; analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta; review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang bersumber dari hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2018

2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis; Analisis Kinerja Pelayanan; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi; Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat; Penelaahan Hasil Reses DPRD

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2018

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 2 (dua) program utama yang diampu yaitu “Program Peningkatan Penanaman Modal” dengan satu indikator kinerja yakni “Jumlah realisasi investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta” dan “Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu” dengan 2 (dua) indikator kinerja yakni “Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat” serta “Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online”. Selain itu terdapat 2 (dua) program yang bersifat umum dan digunakan oleh seluruh OPD yaitu “Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal” dengan indikator kinerja ”indeks kepuasan pelayanan kantor” dan “Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal” dengan indikator kinerja “indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional”

Tabel 2. 1 Realisasi Capaian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Peningkatan Penanaman Modal	Realisasi Investasi	Realisasi investasi adalah Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM.	93,1 Triliun	114,2 Triliun	122.6%	Tercapai dan melebihi target
2.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap	85,5%	85,55%	100%	Tercapai sesuai target

No	Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
			kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.				
		Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online adalah jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan secara online dibandingkan dengan seluruh jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan.	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target
3.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Layanan Kantor	Indeks kepuasan pelayanan kantor berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev. Indeks 1 = 0-25%, Indeks 2 = >25%-50%, Indeks 3 = >50%-75%, Indeks 4 = >75%-100%.	4	4	100%	Tercapai sesuai target
4.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Kendaraan Dinas Operasional	Indeks kepuasan pelayanan KDO berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev. Indeks 1 = 0-25%, Indeks 2 = >25%-50%, Indeks 3 = >50%-75%, Indeks 4 = >75%-100%.	4	4	100%	Tercapai sesuai target

Sumber: LAKIP DPMPTSP 2018

1. **Program Peningkatan Penanaman Modal**

   Indikator kinerja Program Peningkatan Penanaman Modal yaitu jumlah realisasi investasi dengan target pada tahun 2018 sebesar Rp. 93,1 Triliun. Capaian jumlah realisasi investasi pada tahun 2018 melebihi target yakni sebesar Rp. 114,2 Triliun atau tercapai sebesar 122,6%. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.066.886.596,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.537.284.585, yang terdistribusi ke dalam 4 kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
c. Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
d. Penyiapan Proyek Infastruktur Strategis Daerah Yang akan Dikerjasamakan Dengan Badan Usaha

Dari keempat kegiatan tersebut hanya satu kegiatan yang capaian target kinerjanya tidak 100% yakni pada kegiatan "Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal", yang pada tahun 2018 ditargetkan 11 kegiatan pameran promosi penanaman modal namun hanya terealisasi 9 kegiatan pameran promosi penanaman modal atau tercapai 81,82 %. Adapun tidak optimalnya pencapaian target kinerja kegiatan ini dikarenakan minimnya undangan kegiatan pameran promosi penanaman modal dari daerah lain. Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai memfokuskan strategi promosi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (*online*). Adapun dampak dari tidak tercapainya kegiatan ini serta perubahan strategi promosi penanaman modal secara *online* adalah:

1. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal melalui kegiatan pameran (Offline) di tahun-tahun kedepan akan berkurang sehingga target Renstra pada kegiatan ini diperkirakan tidak akan tercapai 100%.
2. Kegiatan promosi secara online akan terus ditingkatkan sehingga diperlukan dukungan anggaran pada kegiatan:
   a. "Penyelenggaraan Jakarta Investment Center" yang didalamnya memuat pengumpulan bahan-bahan promosi secara online pada sistem *Jakarta Virtual Consultant for Bussines* (JVC4B).
   b. "Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik" yang didalamnya memuat kebutuhan pengembangan sistem *Jakarta Virtual Consultant for Bussines* (JVC4B) serta kebutuhan server dan storagenya.
3. Tidak mempengaruhi pencapaian target kinerja program, dikarenakan dengan sistem promosi secara online justru menambah luas cakupan target pasar promosi penanaman modal.

2. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Indikator Kinerja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

- Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat dengan target sebesar 85,5%. Capaian Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat pada tahun 2018 sebesar 85,55% atau tercapai sebesar 100,06%.
- Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online dengan target sebesar 100%. Capaian persentase layanan perizinan dan non perizinan pada tahun 2018 sebesar 100%.

Untuk dapat melaksanakan target kinerja program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 120.247.475.933,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 108.303.275.393,- yang terdistribusi kedalam 14 kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan
c. Pengembangan Call Center serta Komunikasi Masyarakat
d. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)
e. Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
f. Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis
g. Bimbingan Teknis Regulasi Teknis PTSP
h. Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
i. Pengelolaan Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
j. Pengelolaan Kearsipan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
k. Penyediaan Jaringan Internet Pendukung Untuk Peningkatan Pelayanan Publik.
l. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2022
m. Penyediaan Jasa dan Pendukung Penerbitan Rekomendasi Bidang Pertanahan
n. Pengembangan sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik.

Dari empat belas kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu seluruhnya telah tercapai 100 persen dan bahkan terdapat satu kegiatan yang tercapai lebih dari 100 persen yakni “Bimbingan Teknis Regulasi Teknis PTSP” yang pada tahun 2018 ditargetkan diikuti oleh 1.200 orang peserta tercapai 1.597 orang peserta atau tercapai sebesar 133%. Pencapaian yang lebih tinggi ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik dari pelaksana kegiatan dengan narasumber maupun instansi penyelenggara Bimtek sehingga jumlah peserta bimtek dapat dioptimalkan melebihi target.

Untuk tahun 2019 masih diperlukan dukungan anggaran pada program ini terutama dalam rangka mempertahankan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan secara online serta dalam rangka mengantisipasi perubahan kebijakan perijinan di tingkat pusat.

3. **Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal**

   Indikator kinerja Program Peningkatan Penanaman Modal yaitu indeks kepuasan pelayanan kantor dengan target sebesar 4 Indeks. Capaian indeks kepuasan pelayanan kantor pada tahun 2018 sebesar 4 indeks. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 120.520.239.691,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.587.444.430,-, yang terdistribusi ke dalam 11 kegiatan sebagai berikut:

   a. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja.
   b. Penyediaan alat tulis kantor.
   c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   e. Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka
   f. Penyediaan makanan dan minuman
   g. Penyediaan sewa mesin foto copy
   h. Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
   i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
   j. Penyediaan Sewa Rumah dan Kantor Dinas UP PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
   k. Penyediaan Sewa Sarana Mobilitas Air di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Seluruh kegiatan pada program ini tercapai 100% namun untuk serapan anggaran hanya terealisasi 75 %. Tidak optimalnya serapan anggaran antara lain disebabkan harga satuan dalam sistem e-budgeting yang nilainya jauh lebih tinggi dari harga pasar sehingga menyebabkan efisiensi pelaksanaan lelang yang cukup besar. Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) selaku perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penentuan besarnya harga satuan dalam sistem e-budgeting dan di tahun 2019 beberapa harga satuan yang nilainya cukup tinggi telah disesuaikan mendekati harga pasar.

4. **Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal**

   Indikator kinerja Program Peningkatan Penanaman Modal yaitu indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional dengan target sebesar 4 Indeks. Capaian indeks kepuasan pelayanan kantor pada tahun 2018 sebesar 4 indeks atau tercapai sebesar 100%. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.882.190.750,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.249.468.937,-, yang terdistribusi ke dalam 3 kegiatan sebagai berikut:

   a. Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
   b. Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus
   c. Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus

   Seluruh kegiatan pada program ini tercapai 100% sesuai dengan target perencanaan.

Untuk target kinerja beserta realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2018 secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Tahun 2019

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Akhir Periode Renstra DPMPTSP Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
									Target Renja Perangkat Deerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
				URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
				URUSAN PENANAMAN MODAL										
1	**18**	**01**		**Program Peningkatan Penanaman Modal**	**Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta**	**Triliun Rupiah**	**542**		**93,1**	**114,2**	**122,66%**	**100,2**	**214,4**	**39,59%**
1	18	01	002	Pelaksanaan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jenis peraturan/kebijakan yang disusun dan/atau disempurnakan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan	Jenis	5	-	5	5	100,00%	5	5	100,00%
1	18	01	003	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian penanaman modal.	Laporan	25	5	5	5	100,00%	5	10	40,00%
1	18	01	001	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal	Kali	11	-	11	9	81,82%	11	11	100,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Akhir Periode Renstra DPMPTSP Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
									Target Renja Perangkat Deerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	18	01	005	Penyelenggaraan Jakarta Investment Center	Jumlah Bulan	Bulan	48	-	Belum menjadi target	Belum menjadi target	-	12	12	25,00%
1	18	01	004	Penyiapan Proyek Infastruktur Strategis Daerah Yang akan Dikerjasamakan Dengan Badan Usaha	Jumlah Proyek yang Disiapkan	Proyek	16	-	2	2 (7 proyek dilakukan review awal)	100,00%	4	6	37,50%
1	**18**	**02**		**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**Indek**	**92**	**-**	**85,5**	**85,55**	100,06%	**87**	**87**	**95,08%**
1	18	02	006	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)	Jumlah personil Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)	orang	200	-	200	200	100,00%	200	200	100,00%
1	18	02	008	Penyediaan Jasa dan Pendukung Penerbitan Rekomendasi Bidang Pertahanan	Jumlah jenis bidang perizinan	Bidang Perizinan	1	-	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	18	02	010	Penyediaan Jasa Petugas Customer Relation Officer	Jumlah Petugas Customer Relation Officer	Orang	300	-	300	300	100,00%	300	300	100,00%
1	18	02	002	Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan dan Non Perizinan	Jumlah rumpun Izin dan non izin	Rumpun	4	-	4	4	100,00%	4	4	100,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Akhir Periode Renstra DPMPTSP Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
									Target Renja Perangkat Deerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	18	02	011	Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis	Persentase terlaksananya pelayanan izin Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan.	Persen	100	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%
1	18	02	005	Pengelolaan Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%
1	18	02	003	Pengembangan Call Center serta Komunikasi Masyarakat	Waktu pengelolaan call center	Bulan	48	-	12	12	100,00%	12	12	25,00%
				Pengelolaan Call Center	Waktu pengelolaan call center	Bulan	12	-	Menjadi satu dengan kegiatan "Pengembangan Call Center serta Komunikasi Masyarakat"	Menjadi satu dengan kegiatan "Pengembangan Call Center serta Komunikasi Masyarakat"		12	12	100,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Akhir Periode Renstra DPMPTSP Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
									Target Renja Perangkat Deerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	18	02	012	Pelaksanaan Komunikasi Masyarakat Secara Terpadu	Rasio Berita Positif Terhadap Pelayanan DPMPTSP	Rasio	11	-	Menjadi satu dengan kegiatan "Pengembangan Call Center serta Komunikasi Masyarakat "	Menjadi satu dengan kegiatan "Pengembangan Call Center serta Komunikasi Masyarakat"		8	8	72,73%
1	18	02	001	Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan	20	-	4	4	100,00%	4	8	40,00%
1	18	02	009	Bimbingan Teknis Regulasi Teknis	Jumlah pegawai mengikuti bimbingan teknis	Orang	600	-	1.200	1.597	133,08%	600	600	100,00%
1	18	02	007	Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah ISO yang diterapkan	ISO	5	1	1	1	100,00%	1	2	40,00%
				Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2022	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	Dokumen	1	-	1	1	100,00%		1	100,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Akhir Periode Renstra DPMPTSP Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
									Target Renja Perangkat Deerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
				Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Keliling UPPTSP di wilayah Kepulauan Seribu	Waktu penyelenggaraanPelayanan Terpadu Keliling	Bulan	10	-	Belum menjadi kegiatan mandiri	Belum menjadi kegiatan mandiri	-	10	10	100,00%
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online**	**persen**	**100**	**-**	**100**	**100**	100,00%	**100**	**100**	**100,00%**
1	18	02	013	Penyediaan Jaringan Internet Pendukung Untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah lokasi pelayanan yang disediakan jaringan internet	Lokasi	324	-	324	324	100,00%	324	324	100,00%
1	18	02	004	Pengelolaan Kearsipan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase jumlah arsip yang di digitalisasi	persen	100	-	100	100	100,00%	100	100	100,00%
1	18	02	014	Pengembangan sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	persen	100	-	100	100	100,00%	100	100	100,00%
1	**18**	**03**		**Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal**	**indeks kepuasan pelayanan kantor**	**Indek**	**4**	**-**	**4**	**3**	75,00%	**4**	**4**	**100,00%**
1	18	03	001	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Waktu pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Bulan	60	-	12	12	100,00%	12	24	40,00%
1	18	03	002	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	Bulan	60	12	12	12	100,00%	12	24	40,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Akhir Periode Renstra DPMPTSP Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
									Target Renja Perangkat Deerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	18	03	003	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	12	12	12	100,00%	12	24	40,00%
1	18	03	004	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	60	12	12	12	100,00%	12	24	40,00%
1	18	03	005	Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	Jumlah surat terkirim	Surat	75.000	-	15000	15000	100,00%	15000	30000	40,00%
1	18	03	006	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	Bulan	60	12	12	12	100,00%	12	24	40,00%
1	18	03	007	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah mesin fotocopy yang tersedia	Unit	338	338	338	338	100,00%	338	338	100,00%
1	18	03	008	Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Kali	15	3	3	3	100,00%	3	6	40,00%
1	18	03	009	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	-	12	12	100,00%	12	24	40,00%
1	18	03	010	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Waktu penyediaan jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Bulan	48	-	Belum menjadi target	Belum menjadi target	-	12	12	25,00%
1	18	03	011	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	orang	25	-	Belum menjadi target	Belum menjadi target	-	25	25	100,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Akhir Periode Renstra DPMPTSP Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
									Target Renja Perangkat Deerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	18	03	012	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	orang	37	-	Belum menjadi target	Belum menjadi target	-	37	37	100,00%
1	18	03	013	Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Lift Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah lift yang dipelihara	Unit	4	-	Belum menjadi target	Belum menjadi target	-	4	4	100,00%
1	18	03	014	Penyediaan Jasa Pembuangan Sampah	Waktu pembayaran jasa pembuangan sampah	bulan	48	-	Belum menjadi target	Belum menjadi target	-	12	12	25,00%
1	18	03	015	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Jumlah alat pemadam api ringan (APAR) yang dilakukan pengisian	Tabung	36	-	Belum menjadi target	Belum menjadi target	-	36	36	100,00%
1	18	03	016	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Taman Kantor	Jumlah Jasa petugas pemelihara Taman Kantor	Orang	2	-	Belum menjadi target	Belum menjadi target	-	2	2	100,00%
1	18	03	017	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC ME dan Genset Kantor	Waktu pelaksanaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC ME dan Genset Kantor	Bulan	48	-	Belum menjadi target	Belum menjadi target	-	12	12	25,00%
1	18	03	018	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	Gedung	1	-	Belum menjadi target	Belum menjadi target	-	1	1	100,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Akhir Periode Renstra DPMPTSP Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
									Target Renja Perangkat Deerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	18	03	019	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	Jumlah Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	Orang	380	-	Menjadi satu dengan kegiatan "Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/carakat"	Menjadi satu dengan kegiatan "Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/ carakat"	-	380	380	100,00%
1	18	03	005	Penyediaan Sewa Rumah dan Kantor Dinas UP PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Waktu Penyediaan Sewa Rumah dan Kantor Dinas	Tahun	5	-	1	1	100,00%	1	2	40,00%
1	18	03	007	Penyediaan Sewa Sarana Mobilitas Air di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Waktu Sewa Sarana Mobilitas Air	Tahun	5	-	1	1	100,00%	Menjadi satu dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Keliling UPPTSP di wilayah Kepulauan Seribu	1	20,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Akhir Periode Renstra DPMPTSP Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
									Target Renja Perangkat Deerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	**18**	**04**		**Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal**	**Indeks Kepuasan Kendaraan Dinas Operasional**	**Indek**	**4**		**4**	**4**	**100,00%**	**4**	**4**	**100,00%**
1	18	04	001	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Jumlah BBM KDO/KDO Khusus	Liter	134.090	-	134.090	86.848	64,77%	134.090	134.090	100,00%
1	18	04	002	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	Jumlah KDO/KDO Khusus yang disediakan perizinannya	Unit	355	-	355	355	100,00%	355	355	100,00%
1	18	04	003	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	Jumlah KDO/KDO Khusus yang dipelihara	Unit	355	-	355	355	100,00%	355	355	100,00%
1	**20**	**56**		**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**										
1	20	56	001	Bimbingan teknis regulasi teknis PTSP	Terlaksananya bimbingan teknis bagi pegawai BPTSP	Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-
1	20	56	003	Pelaksanaan Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-
1	20	56	005	Pelaksanaan dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan	Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-
1	20	56	006	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Akhir Periode Renstra DPMPTSP Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
									Target Renja Perangkat Deerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
					Teknologi Informasi Pelayanan Publik									
1	20	56	009	Peningkatan Kompetensi Pegawai Dalam Penerapan Sistem Teknologi Informasi	meningkatnya kompetensi pegawai	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	-	-
1	20	56	011	Pengembangan Call Center dan Komunikasi Masyarakat	Terkelolanya Pengembangan Call Center dan Komunikasi Masyarakat	Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-
1	20	56	012	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Pelayanan PTSP	Tersusunnya Kebijakan dan Regulasi Pelayanan PTSP	Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-
1	20	56	013	Pengelolaan dan Pengembangan Survey Kepuasaan Masyarakat	terselenggaranya Survey Kepuasaan Masyarakat	Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-
1	20	56	014	Penyediaan Back Up Jaringan Pelayanan Publik	Tersedianya Back Up Jaringan Pelayanan Publik	Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-
1	20	56	015	Pengelolaan Customer Relationship Management (CRM) pada PTSP	Terkelolanya Customer Relationship Manager (CRM) pada PTSP	Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-
1	20	56	016	Penyediaan Jasa dan Pendukung Penerbitan Rekomendasi Bidang Pertanahan	Tersedianya Jasa dan Pendukung Penerbitan Rekomendasi Bidang Pertanahan	Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-
1	20	56	018	Peningkatan Kualitas Ruang Pelayanan PTSP	Meningkatnya Kualitas Ruang Pelayanan PTSP	Lokasi	-	318	-	-	-	-	-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Akhir Periode Renstra DPMPTSP Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
									Target Renja Perangkat Deerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1	20	56	019	Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terkelola dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-
1	**20**	**61**		**Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian**										
1	20	61	007	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-
1	20	61	008	Penyediaan Jasa Ekspedisi	Tersedianya Jasa Ekspedisi	Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-
1	20	61	009	Penyediaan Jasa Administrasi	Tersedianya Jasa Administrasi	Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-
1	20	61	010	Penyediaan BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-

Sumber: LAKIP DPMPTSP Tahun 2018 (diolah)

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 merupakan target kinerja tahun kesatu dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, yang didalamnya memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi. Selain indikator dalam Renstra pada tahun 2018 ditambahkan pula beberapa indikator yang mendukung prioritas provinsi yakni:

1. Indikator Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), indikator Penyampaian laporan fungsional bendahara pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu dan Persentase progres tertib administrasi pengelolaan aset/barang inventaris OPD untuk mendukung target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Indikator persentase progres updating data strategis OPD pada portal data Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
3. Indikator progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD dalam rangka optimalisasi penyerapan APBD Provinsi DKI Jakarta.

Adapun target kinerja dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dapat disajikan melalui tabel berikut :

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator	Satuan	Target Renstra DPMPTSP					Realisasi Capaian Tahun ke 1 (2018)	Proyeksi			Catatan
			Tahun ke 1 (2018)	Tahun ke 2 (2019)	Tahun ke 3 (2020)	Tahun ke 4 (2021)	Tahun ke 5 (2022)		Tahun ke 2 (2019)	Tahun ke 3 (2020)	Tahun ke 4 (2021)	
1	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Triliun	93,1	100,2	107,8	115,9	124,5	114,2	100,2	107,8	115,9	IK Daerah RPJMD, Target Renstra
2	Indeks kepuasan masyarakat	Indek	85,5	87	88,5	90	91,5	85,55	87	88,5	90	IKU RPJMD, IK Daerah RPJMD, Target Renstra
3	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	IK Daerah RPJMD, Target Renstra
6	Persentase progres updating data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi	dataset	3	3	-	-	-	3	3	-	-	Target prioritas provinsi lainnya/ Perjanjian Kinerja

No	Indikator	Satuan	Target Renstra DPMPTSP					Realisasi Capaian Tahun ke 1 (2018)	Proyeksi			Catatan
			Tahun ke 1 (2018)	Tahun ke 2 (2019)	Tahun ke 3 (2020)	Tahun ke 4 (2021)	Tahun ke 5 (2022)		Tahun ke 2 (2019)	Tahun ke 3 (2020)	Tahun ke 4 (2021)	
7	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	-	-	-	77	100	-		Target prioritas provinsi lainnya/ Perjanjian Kinerja
8	Persentase progress tertib administrasi pengelolaan aset/ barang inventaris OPD	Persen	100	100	-	-	-	100	100	-	-	Target prioritas provinsi lainnya/ Perjanjian Kinerja
9	Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	Persen	100	Tidak ditargetkan	-	-	-	95	Tidak ditargetkan	-	-	Target prioritas provinsi lainnya/ Perjanjian Kinerja
10	Penyampaian Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu.	Persen	100	100	-	-	-	100	100	-	-	Target prioritas provinsi lainnya/ Perjanjian Kinerja

Sumber: Renstra DPMPTSP tahun 2017-2022
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
LAKIP DPMPTSP Tahun 2018

1. Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI Jakarta

Capaian kinerja jumlah realisasi investasi pada tahun 2018 melebihi target yakni sebesar Rp. 114,2 Triliun dari target sebesar Rp. 93,1 Triliun atau tercapai sebesar 122,6%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan sebesar 5,16% yakni dari 108,6 Triliun pada tahun 2017 menjadi 114,2 Triliun pada tahun 2018. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian indikator ini telah tercapai 91,73%.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah:

a. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Penanaman Modal dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang antara lain digunakan untuk harmonisasi peraturan, pelaksanaan promosi dan pengendalian penanaman modal.
b. Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non izin secara online,

Peresmian Jakarta Investment Center oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Layanan Gerai Memulai Usaha (Starting Business Corner)

c. Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu gedung pelayanan,
d. Perbaikan dalam kebijakan Ease of Doing Business (EoDB) yang mempengaruhi investor dalam menginvestasikan dananya di Jakarta.
e. Dikembangkannya Jakarta Investment Center (JIC) untuk memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan segala informasi tentang investasi di Jakarta.
f. Dibentuk gerai memulai usaha (Starting Business Corner) pada Mal Pelayanan Publik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan serta untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah kegiatan usaha.
g. Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehinga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh para investor di DKI Jakarta.

Tantangan dalam mencapai target kinerja adalah:

a. Kebijakan penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang belum terintegrasi dengan sistem informasi pelayanan izin di daerah (JAKEVO).
b. Harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah yang belum tercapai.
c. Masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya menerima informasi perubahan kebijakan yang telah dilakukan Pemda DKI Jakarta terkait *Ease of Doing Business* (EoDB).
d. Masih terbatasnya informasi proyek-proyek investasi yang akan dipromosikan.

Tindak lanjut tantangan:

a. Melakukan pengkajian dan penelaahan atas adanya kebijakan yang baru agar dapat diimplementasikan antara lain dengan melakukan koordinasi teknis dengan Tim Teknis OSS di Kemenko Perekonomian agar sistem OSS dan JAKEVO dapat terintegrasi dengan baik.
b. Menyederhanakan regulasi investasi dan atau penanaman modal serta melakukan sosialisasi regulasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
c. Meningkatkan aktivitas promosi melalui Branding (awareness campaign, penguatan citra investasi DKI) dan Bussines Forum.
d. Mengoptimalkan fungsi JIC dalam rangka memperoleh informasi terkait proyek-proyek investasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

2. Persentase Tingkat kepuasan masyarakat

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2018 sebesar 85,55% dari target sebesar 85,50% atau tercapai sebesar 100% dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan sebesar 2,25% yakni dari 83,66% pada tahun 2017 menjadi 85,55% pada tahun 2018. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian indikator ini telah tercapai 93.50%.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah:

a. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

b. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia DPMPTSP untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
c. Tersedianya sarana prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan.
d. DPMPTSP berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui harmonisasi peraturan dan penyederhanaan persyaratan pelayanan perizinan dan non perizinan.
e. Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui portal pelayanan.jakarta.go.id
f. Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik sebagai one-stop service 328 perizinan dan pelayanan terpadu kerjasama pelayanan pemerintah pusat dan daerah.
g. Dikembangkannya JAK EVO sebuah aplikasi untuk mengurus perizinan di DKI Jakarta. Secara keseluruhan untuk layanan perizinan secara elektronik periode tahun 2018 berjumlah 310.320 layanan. Layanan perizinan elektronik terdiri dari layanan perizinan eletronik yang masuk, yang telah selesai, masih dalam proses dan layanan perizinan elektronik yang ditolak.
h. Dikembangkan mekanisme Online Data Sharing antara DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta, Online Data Sharing ini berguna untuk menginformasikan perizinan dan non perizinan yang terlah diterbitkan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta kepada SKPD Provinsi DKI Jakarta yang menjadi Binwasdal bidang perizinan tersebut.
i. Diselenggarakannya PTSP *Goes To Mall* dengan dalam rangka mendekatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Tahun 2018 terdapat 31 mall di seluruh wilayah Jakarta yang menjadi lokasi PTSP *Goes To Mall* dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kemudian layanan ini diperluas menjadi penyelenggaraan PTSP

Inovasi Layanan DPMPTSP

pada ruang publik seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, terminal, pasar tradisional, dan ruang publik lainnya

j. Tersedianya pelayanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yaitu layanan antar jemput berkas izin bagi pemohon yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung mengurus izin ke loket, semua jenis perizinan dan non perizinan dapat dilakukan melalui AJIB dengan syarat pemohon harus sebagai pimpinan/karyawan perusahaan tersebut dan bukan pihak ketiga atau calo, selain itu dikembangkan pelayanan AJIB dengan Mobile Service Unit (MSU) sebanyak 3 unit yang dapat juga melayani perizinan dan non perizinan di lokasi tertentu. Jumlah jasa pengurusan melalui AJIB

pada tahun 2018 secara keseluruhan 141.263 layanan dan layanan MSU sebanyak 14.056 layanan.

k. Tersedianya layanan Call Center DPMPTSP yang dapat diakses melalui sambungan telepon 021-1500164 untuk melayani informasi pengurusan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan masyarakat dan pemesanan layanan AJIB. Selama tahun 2018 Call Center DPMPTSP telah melayani sebanyak 159.678 layanan.

l. Adanya pelayanan IMB 3.0 yakni pengurusan IMB dengan waktu 3 jam untuk luas tanah >200 m2, dengan syarat ketentuan berlaku.

m. Melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut:
   - Mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungutan liar dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas pungutan liar;
   - Mengantisipasi adanya pungutan liar pada semua bentuk layanan;
   - Memberikan akses yang luas pada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan;
   - Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah praktik pungutan liar;
   - Membuka akses yang mudah dan murah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan;
   - Memberikan sanksi yang tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pungutan liar secara berjenjang.
   - Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah lainya yang terkait dengan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pemberantasan pungli;
   - Melakukan pengawasan melekat terhadap jajaran dibawahnya untuk mencegah pungutan liar dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

n. Ditetapkannya standar operasional prosedur manajemen mutu tentang Manual Mutu dan Dokumen Sistem Manajemen Mutu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

o. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta agar dapat memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih efektif dan efisien maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
   - Bimbingan Teknis;
   - Pembelajaran melalui *e-book*;
   - Tes kompetensi teknis;
   - Pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi.

Tantangan dalam mencapai target kinerja adalah:

a. Adanya perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu penyesuaian.
b. Masih adanya anggapan bahwa layanan perizinan dan non perizinan sulit dan rumit.
c. Masih terdapat rekomendasi dari SKPD teknis terhadap perizinan dan non perizinan yang melebihi batas waktu.
d. Kebutuhan SDM Teknis masih ada kekurangan.

Tindak lanjut tantangan:

a. Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP terkait diagendakan secara terjadwal serta melibatkan stakeholder terkait.
b. Pembuatan program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian fakta berbasis data bahwa DPMPTSP merupakan tempat pengurusan izin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada pungli.
c. Dikembangkan aplikasi pemberian rekomendasi secara online (e-rekomtek)
d. Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.

3. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online

Layanan perizinan dan non perizinan online dikembangkan untuk memastikan masyarakat memperoleh jaminan pelayanan sesuai dengan SOP, yakni jaminan prosedur, syarat, waktu dan biaya. Selain itu dengan adanya layanan online diharapkan mampu mengurangi jumlah calo yang merugikan pemohon.

Capaian persentase layanan perizinan dan non perizinan secara online tahun 2018 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2018 maupun target jangka menengah maka indikator ini telah tercapai 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator ini adalah:

a. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pengembangan layanan perizinan dan non perizinan secara online.
b. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh SDM DPMPTSP untuk memberikan masukan terhadap pengembangan sistem online DPMPTSP.
c. Dukungan dari SKPD teknis terkait yakni Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov. DKI Jakarta dalam rangka pengembangan sistem online berupa pemberian rekomendasi.
d. Tersedianya SOP yang lengkap terkait perizinan dan non perizinan sebagai dasar pembuatan bisnis proses pengembangan sistem *online*.

Tantangan pencapaian indikator

a. Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP untuk terus mengembangkan sistem online layanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat dan akomodatif terhadap kebutuhan pemohon.
b. Kurangnya sarana prasana DPMPTSP di Bidang Sistem Teknologi Informasi (server)

Tindaklanjut Tantangan

Telah dialokasikan anggaran penyediaan sarana sistem teknologi informasi (pengadaan server) pada tahun 2019 untuk mendukung kemandirian pengembangan sistem teknologi informasi

4. Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)

Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2018 adalah 77,4% dari target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan capaian indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil. Adapun penyebab belum optimalnya capain indikator kinerja ini adalah karena penyelesain tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK sangat tergantung kewenangan *stakeholder* lain.

Terhadap kendala dan permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya pencapaian indikator tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi terus dilakukan dengan berbagai instansi terkait secara lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi terkait.

5. **Jumlah Updating Data Strategis OPD pada Portal data Jakarta Sesuai Tugas Dan Fungsi.**

Capaian Jumlah updating data strategis OPD pada portal data Jakarta sesuai tugas dan fungsi pada tahun 2018 tercapai 100% yaitu 3 dataset dari target yang ditetapkan sesuai RPJMD dan Renstra sebanyak 3 dataset. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapainya target ini karena telah terinplementasinya pelayanan dan pelaporan perizinan secara online, sehingga data strategis OPD dapat diperoleh dengan mudah dan lebih cepat terupdate.

6. **Persentase Progress Tertib Administrasi Pengelolaan Aset/Barang Inventaris OPD.**

Capaian persentase progress tertib administrasi pengelolaan aset/barang inventaris OPD tahun 2018 telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Adapun terpenuhinya target ini dikarenakan adanya komitmen yang tinggi diseluruh jajaran DPMPTSP terutama pengelola barang dalam melaksanakan seluruh tahapan tertib administrasi pengelolaan aset/barang sesuai ketentuan yang disusun BPAD, sebagaimana berikut:

a. Inventarisasi aset (mencetak daftar barang berdasarkan KIB 2017 di Sistem Informasi Aset).
b. Input hasil inventarisasi dan pencacahan data aset dalam Sistem Informasi Aset.
c. Identifikasi/penempelan identitas aset (Barcoding).
d. Melakukan pelaporan (penginputan dan pelaporan) sesuai posisi aset pada KIB Tahun 2017.

7. **Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD.**

Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD terdiri rata-rata realisasi fisik dan keuangan untuk SKPD dan unit dibawahnya di tahun 2018. Target realisasi pelaksanaan kegiatan APBD DPMPTSP di tahun 2018 adalah 100%

sedangkan realisasinya sebesar 95,16%. Adapun yang menyebabkan tidak optimalnya capaian kinerja indikator ini adalah:

a. Harga satuan dalam system e-budgeting yang nilainya jauh lebih tinggi dari harga pasar sehingga menyebabkan efisiensi pelaksanaan lelang yang cukup besar.
b. Terdapat kegiatan yang sudah dua kali gagal lelang disebabkan spesifikasi yang diajukan oleh pemenang lelang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan, dan tidak memungkinkan waktunya untuk diadakan penunjukkan langsung.
c. Seringkali narasumber/ tenaga ahli pada kegiatan sidang Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) tidak hadir dalam sidang sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran kegiatan tersebut.

Terhadap permasalahan tersebut diatas telah ditempuh beberapa alternative penyelesaian masalah sebagai berikut:

a. Telah dilakukan koordinasi dengan BPAD selaku OPD yang memiliki kewenangan dalam penentuan besarnya harga satuan dalam sistem e-budgeting dan di tahun 2019 beberapa harga satuan yang nilainya cukup tinggi telah disesuaikan mendekati harga pasar.
b. Pada tahun 2019 direncanakan kegiatan yang gagal lelang akan dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sebagai antisipasi jika terjadi gagal lelang kembali dapat dilakukan penunjukan langsung.
c. Dilakukan penambahan jadwal sidang TABG dalam rangka optimalisasi penyerapan dan percepatan penerbitan izin.

8. Penyampaian Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara Tepat Waktu.

Penyampaian laporan fungsional bendahara pengeluaran DPMPTSP Tahun 2018 sesuai dengan SAP dan tepat waktu. Target penyampaian laporan fungsional bendahara pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP Tahun 2018 adalah 100% sedangkan capaian untuk tahun 2018 adalah 98,75%. Permasalahan pada kegiatan tersebut dikarenakan pada bulan Januari ada 1 (satu) UKPD yang belum melakukan tutup buku karena ada permasalahan teknis.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta masukan dari penyelenggara pelayanan Provinsi DKI Jakarta, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
Pengembangan	➢ Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan setiap unit tidak sama atau berbeda, jumlah SDM dan sarana teknis juga tidak sebanding dengan jumlah layanan yang dimohon;	➢ Pemetaan kebutuhan SDM setiap unit layanan serta panduan standarisasi kompentensi yang diperlukan untuk menunjang tupoksi setiap unit layanan; ➢ Diklat diagendakan terjadwal dan harus mengacu pada peningkatan kompentensi untuk menunjang aktivitas unit layanan atau bidang; ➢ Dilakukan rekrutmen PJLP guna memenuhi kekurangan kebutuhan pegawai dan menerima pegawai/mahasiswa magang; ➢ Dilakukan rekrutmen pegawai kontrak atau penambahan formasi PNS kedepan khusus untuk bidang ilmu komputer, teknik informatika, dan atau sistem teknologi informasi;
	➢ Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak selalu dapat direalisasikan oleh daerah;	➢ Respon daerah terhadap kebijaan pusat harus disikapi melalui pengkajian dan telaah mendalam untuk disesuaikan sehingga dapat diimplementasikan daerah dalam bentuk kebijakan atau aturan yang baru atau pendukung lainnya;
	➢ Pencapaian indeks kepuasan masyarakat belum optimal;	➢ Identifikasi kelebihan dan kekurangan melalui survey kepuasan publik yang biasanya dilakukan berkala, kemudian dibuat program atau kegiatan untuk

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
		meningkatkan hal yang sudah dianggap baik dan memperbaiki yang yang masih kurang baik;
	➢ Kualitas mal pelayanan publik yang belum optimal	➢ Melakukan peningkatan kualitas Mal Pelayanan Publik
Penanaman modal	➢ Iklim investasi global yang mempengaruhi banyaknya investor dalam menginvestasikan dananya di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta;	➢ Membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan investor dan menarik investor untuk investasi di Provinsi DKI Jakarta; ➢ Meningkatkan promosi dalam upaya menarik investor untuk berinvestasi di Provinsi DKI Jakarta ➢ Kajian parsial dan komprehensif terhadap trend atau kecenderungan investasi global, nasional, dan regional;
	➢ Meningkatnya keunggulan komparatif (daya saing) investasi daerah pesaing sehingga daerah pesaing menjadi lebih menarik untuk berinvestasi;	➢ Memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha bagi calon investor
	➢ Promosi investasi daerah belum optimal sehingga Jakarta belum menjadi Brand Tujuan Investasi Nasional;	➢ Aktivitas promosi perlu ditingkatkan melalui Branding (awareness campaign, penguatan citra investasi DKI); Iklan Media (media berbayar, milik sendiri, media sosial, dan endorses); Selling atau Jemput Bola; ➢ Jakarta Investment Center perlu didorong lebih aktif dan proaktif menjadi bagian dari promosi Jakarta untuk menciptakan Brand Jakarta sebagai Tujuan Investasi Nasional; ➢ Dibuat forum bersama atau komunikasi lintas stakeholders dengan

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
		melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten;
	➢ Kebijakan pusat yang tidak semuanya dapat diakomodasi dan direalisasikan oleh daerah;	➢ Perlu dikaji dan ditelaah setiap regulasi baru yang muncul agar dapat diimplementasikan daerah;
	➢ Regulasi investasi dan atau penanaman modal sering berubah sehingga investor tidak memiliki kepastian dalam berusaha (iklim investasi) ;	➢ Disederhanakannya regulasi investasi dan atau penanaman modal; ➢ Sosialiasi regulasi harus mempunyai agenda terjadwal yang diinisiasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, narasumber kompeten;
	➢ SDM tidak memiliki kompetensi dan pemahaman terkait investasi baik regulasi, potensi daerah dan cara mempromosikan potensi daerah;	➢ Panduan standarisasi kompetensi SDM terkait investasi dan atau penanaman modal; ➢ Pelatihan pendukung guna meningkatkan kompetensi yang diagendakan terjadwal; ➢ Diklat, seminar atau *Coffee Morning* yang membahas informasi terbaru tentang investasi baik regulasi, trend, dan hal terkait lainnya;
	➢ Peningkatan *self awareness* terhadap pentingnya Jakarta sebagai bagian dari Ease of Doing Business (EODB);	➢ Dibuat panduan teknis yang menjadi acuan komponen penilaian EODB; ➢ Dibuat pertemuan berkala baik melalui kajian ilmiah atau seminar akan pentingnya Jakarta sebagai kontributor nasional pada survey EODB;
	➢ Masih adanya investor yang terlambat atau belum membuat LKPM;	➢ Perlu ada sosialisasi akan pentingnya LKPM bagi investor; ➢ Perlu dibuat aturan yang mengatur pelaporan LKPM; ➢ Perlu ditetapkan sistem reward dan punishment untuk

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
		pelaporan LKPM oleh investor;
	➢ Jakarta Investment Center belum berjalan secara optimal	➢ Mengoptimalkan Jakarta Investment Center sebagai pusat kegiatan dalam melakukan investasi dan penanaman modal
	➢ Dampak kerjasama global baik yang bersifat bilateral dan multilateral (seperti AFTA, AEC, dan sebagainya) terhadap investasi di DKI Jakarta;	➢ Pelibatan dan koordinasi dengan semua instansi terkait untuk menjaga iklim investasi yang kondusif serta aktivitas program kerja bersama sebagai respon adanya kerjasama global;
Pengaduan dan komunikasi Masyarakat	➢ Potensi resiko meningkatnya jumlah tuntutan dari pemilik ijin sebagai akibat adanya pelanggaran ketentuan (misal: tuntutan dicabutnya ijin karena pelanggaran dibidang pariwisata/spa/panti pijat/ hiburan malam dan sebagainya);	➢ Dibuatnya aturan yang jelas termasuk sistem reward dan punishment terkait kepatuhan ijin usaha; ➢ Dibuat panduan tahapan pencabutan ijin usaha akibat adanya pelanggaran ketentuan ; ➢ Sosialisasi berkala terhadap aturan dan tahapan pencabutan ijin usaha terhadap pemilik ijin usaha agar mematuhi ketentuan dan kesepakatan atas pemberian ijin usaha;
	➢ Potensi resiko meningkatnya jumlah tuntutan karena pencabutan ijin sebagai akibat adanya perubaha kebijakan tata ruang;	➢ Dibuatnya aturan yang mengatur kewenangan terkait pengalihan dan atau kemungkinan pencabutan ijin usaha atau pemindahan ijin usaha sebagai akibat perubahan kebijakan tata ruang; ➢ Sosialisasi RTRW dan aturan terhadap adanya kewenangan pemerintah provinsi untuk mengalihkan dan atau kemungkinan mencabut ijin usaha karena perubahan kebijakan tata ruang;

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	➢ Belum tersedianya SDM sesuai bidang kerja pengaduan dan komunikasi masyarakat;	➢ Identifikasi kebutuhan SDM (jurusan komunikasi dan hukum) lalu menyusun panduan kompetensi teknis serta melakukan perekrutan terkait kebutuhan bidang pengaduan dan masyarakat;
	➢ Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP;	➢ Pelatihan pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan; ➢ Sosialisasi peraturan, kebijakan, dan SOP terkait harus mempunyai agenda terjadwal dan bersifat segera serta diinisiasi pemerintah daerah melalui DPMPTSP;
	➢ Kontain media sosial milik DPMPTSP masih kurang update;	➢ Terus melakukan update informasi, berita, prestasi atau penghargaan, inovasi, peraturan dan hal terkait lainnya dengan media sosial baik lewat website, twitter, instagram, facebook, dan media sosial lainnya;
	➢ Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa ijin sulit dan adanya konten negatif lain terkait DPMPTSP;	➢ Dibuat program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian fakta berbasis data bahwa DPMPTSP merupakan tempat pengurusan ijin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada pungutan, dan hal positif lainnya;
Tataruang, lingkungan, & pembangunan	➢ Perubahan kebijakan tata ruang dan atau kebijakan terkait lainnya yang dapat mempengaruhi investasi DKI Jakarta;	➢ Perlu diantisipasi dengan prosedur atau aturan yang dapat meminimalisir selain juga tidak menghambat investasi; ➢ Perlu melakukan kajian dan telaah mendalam terkait dampak atau akibat perubahan kebijakan tata ruang atau kebijakan lain

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
		terhadap investasi di DKI Jakarta;
	➢ Kebutuhan SDM teknis yang masih kurang;	➢ Perlu dilakukan pemetaan kebutuhan SDM dan panduan kompetensi teknis dalam proses rekrutmen;
	➢ Pengembangan layanan online;	➢ Perlu melakukan layanan berbasis aplikasi yang disesuaikan dengan era ekonomi digital; ➢ Terus melakukan inovasi pelayanan dan pro aktif melakukan perbaikan dari keluhan yang disampaikan pengguna;
	➢ Pemenuhan sarana teknis;	➢ Identifikasi dan pengadaan sarana teknis yang diperlukan
Aktivitas usaha	➢ Pengembangan layanan online	➢ Terus melakukan inovasi pelayanan dan pro aktif melakukan perbaikan;
	➢ Belum adanya langkah atau upaya tindak lanjut setelah seluruh layanan bersifat online;	➢ Perlu diinisiasi (melalui kajian ilmiah, seminar, talk show, dan narasumber) terhadap peran AJIB dan CRO agar menjadi lebih optimal ketika seluruh layanan sudah online;
	➢ Perubahan kebijakan baik terkait aktivitas investasi, tata ruang, dan kebijakan lain;	➢ Dibuat sosialisasi terkait perubahan kebijakan baik dengan seminar, talk show, temu ilmiah, kajian, dan diskusi narasumber;
	➢ Kebutuhan SDM teknis yang masih kurang;	➢ Pemetaan kebutuhan SDM dan penyusunan standarisasi kompetensi teknis SDM yang dapat menjadi panduan proses rekrutmen pegawai; ➢ Rekrutmen pegawai menyesuaikan kebutuhan dan standar kompetensi teknis;
Sekretariat	➢ Masih belum tercukup sarana prasana di lingkup DPMPTSP	➢ Inventarisasi dan koordinasi untuk pendataan ulang serta

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
		melakukan pengadaan sarana prasarana;
	➢ Belum adanya standarisasi ruangan pelayanan PTSP;	➢ Membuat standarisasi ruangan pelayanan PTSP;
	➢ Belum seragamnya pemahaman SDM mengenai standarisasi administrasi keuangan;	➢ Disusun panduan teknis terhadap standarisasi keuangan; ➢ Pelatihan berkala terhadap peningkatan kapasitas staf administrasi keuangan; ➢ Diklat, seminar, atau *Coffee Morning* yang membahas informasi dan perkembangan terbaru mengenai administrasi keuangan;
	➢ Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ANJAB dan ABK;	➢ Identifikasi dan pemetaan kebutuhan serta pengadaan SDM untuk memenuhi standarisasi dan kompetensi sesuai ANJAB dan ABK;
	➢ Perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian belum menjadi prioritas;	➢ Dibuat kesepakatan dan kesepahaman bersama terhadap pentingnya perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian;
Pusat Sistem Teknologi dan Kearsipan	➢ Perlunya kemandirian DPMPTSP dalam mengembangnkan sistem pelayanan online	➢ Mempercepat proses pengembangan untuk mendukung kemandirian melalui proses "*transfer knowledge*" keahlian pengembangan sistem dengan mendatangkan pakar atau ahli dibidangnya; ➢ Mengakomodasi perubahan sebagai bagian dari penyesuaian era ekonomi digital dengan proses belajar, kajian independen, *lesson learned*, konsultasi ahli / narasumber, kunjungan lapangan, dan aktivitas pendukung lain;

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	➢ Pengembangan sistem pelayanan online;	➢ Diperlukan inovasi yang sejalan dengan perkembangan ekonomi digital dengan beberapa penyesuaian terutama penggunaan layanan berbasis aplikasi.
	➢ Belum tersedianya SDM dengan yang cukup di lingkungan DPMPTSP menyebabkan ketergantungan kepada Dinas lain dalam pengembangan sistem;	➢ Identifikasi dan pembuatan panduan teknis terkait standar kompetensi SDM di bidang ini; ➢ Pengadaan kebutuhan SDM sesuai standar kompetensi teknis;
PIP-KI	➢ Jangka waktu umur proyek yang sangat Panjang sementara masa pemerintahan hanya lima tahun membuat calon investor tidak memiliki kepastian terhadap keberlangsungan dari program ini	➢ Menyakinkan calon investor bahwa program ini memiliki dasar hukum yang kuat yaitu • Perpres Nomor 38 Tahun 2015 • Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 • Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 • PMK Nomor 190/PMK.08/2015 • Permendagri No 96 tahun 2016 sehingga tidak bergantung terhadap masa pemerintahan Gubernur
	➢ Kemampuan SDM terhadap pemahaman mengenai KPDBU menjadi permasalahan dalam memasarkan proyek-proyek yang ingin dikerjasamakan ➢ Biaya operasional karena banyaknya tahapan yang harus dilakukan dalam kegiatan perencanaan KPDBU dan juga kegiatan pendukung lainnya.	➢ Melakukan pelatihan dan Bimtek bagi pegawai dilingkungan DPMPTSP serta sosialisasi terkait KPDBU untuk memahami konsep dan cara kerja dari KPDBU ➢ Memberikan penambahan anggaran untuk biaya operasional KPDBU

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	➢ Kesulitan dalam memasarkan dan menawarkan proyek-proyek KPDBU karena informasi terkait proyek KPDBU tidak tersebar secara sempurna	➢ Membuat media promosi secara online sehingga informasi bisa tersebar ke semua calon investor
	➢ Perencanaan yang baik dalam penentuan proyek KPDBU untuk mengurangi potensi proyek mangkrak dan gagal	➢ Menyediakan anggaran khusus untuk perencanaan proyek-proyek KPDBU

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini, terutama berkaitan dengan tantangan dan peluang yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2020. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan.

Beberapa faktor yang dianggap sebagai tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu penyesuaian.
2. Jumlah sumber daya manusia dan kemampuan SDM yang tidak merata.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur pendukung) yang belum sepenuhnya memadai.
4. Peningkatan promosi potensi investasi di pasar domestik dan luar negeri.
5. Masih adanya anggapan bahwa layanan perizinan dan non perizinan sulit dan rumit.
6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi diantaranya dalam pemberian rekomendasi dari SKPD teknis terhadap perizinan dan non perizinan yang masih melebihi batas waktu.
7. Anggapan dan pemberitaan bahwa ijin sulit dan adanya konten negatif lain terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sedangkan beberapa faktor yang dianggap sebagai peluang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
3. Adanya landasan hukum tentang kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui portal pelayanan.jakarta.go.id.
5. Dukungan terhadap pelaksanaan inovasi yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain Jakevo, JVC4B, AJIB, MSU, PTSP Goes to area public, IMB 3.0, Call Center dan lain-lain.
6. DKI Jakarta merupakan daerah perkotaan dan ibu kota negara dengan letak geografis yang strategis serta tersedianya jaringan infrastruktur yang lengkap.
7. Indikator ekonomi yang menunjukan nilai positif diantaranya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat inflasi yang stabil dan terjaga serta banyaknya potensi pengembangan jasa dan perdagangan tinggi.
8. Dukungan dari stakeholder lain diantaranya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov. DKI Jakarta dalam rangka pengembangan sistem online berupa pemberian rekomendasi, Instansi-instansi lain (Mal, Rumah Sakit, Pasar Jaya dan lain-lain) dalam rangka pelaksanaan kegiatan PTSP Goes to area publik.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM, dan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi DKI Jakarta. Dinamika Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terus melakukan perbaikan sebagai sebuah entitas yang mandiri di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan usaha. Berbagai indikator capaian kinerja yang sudah diperoleh diantaranya dengan meningkatknya kecepatan dan kesederhanaan pelayanan PMA dan PMDN melalui penyediaan sistem operasi standar dan dukungan infrastruktur teknologi informasi serta layanan jemput dokumen.

2. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang berdampak pada perubahan ketentuan dan bisnis proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan.
3. Kondisi potensi dan peluang investasi di Provinsi DKI Jakarta yang cukup besar dapat mendorong pertumbuhan investasi baik PMA maupun PMDN.
4. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dan inflasi yang stabil dapat mendorong pertumbuhan investasi di DKI Jakarta.
5. Paket-paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan saran prasarana.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Rancangan Awal RKPD merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja. Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta. Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam upaya pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang diupayakan melalui Peningkatan kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*). Peningkatan kemudahan dalam berusaha (ease of doing business)

sejalan dengan kebijakan Pemerintah tentang “Ease of Doing Business” yang mengupayakan kemudahan berusaha bagi masyarakat, Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya peningkatan pelayanan publik dapat direalisasikan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, pemanfaatkan/ penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan membangun sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan dan manajemen pemerintahan, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik. Perbaikan komponen-komponen “ease of doing business” yang menjadi domain pemerintah provinsi, antara lain menyederhanakan tahap-tahap izin konstruksi, mempercepat waktu memulai usaha, dan menyederhanakan proses pendaftaran properti untuk usaha. Selain itu, juga akan dilakukan peningkatan kualitas pelayanan online, baik untuk perizinan maupun non perizinan, serta terus mengupayakan efektifitas daripada Mal Pelayanan Publik

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) merupakan kegiatan strategis yang disusun sebagai pelaksanaan RPJMD 2017 -2022 dalam memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab KSD. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018, ada 60 Kegiatan Strategis Daerah, adapun KSD yang menjadi tanggung jawab langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

a. Peningkatan Peringkat Ease of Doing Business (EoDB)
b. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik melalui Pembentukan Jakarta Investment Center (JIC) dan Starting Business Corner

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Target per tahun terhadap indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah pada Aspek Pelayanan Umum dimana menyelenggarakan Urusan Penanaman Modal dan termasuk dalam Urusan Wajib Pelayanan non Dasar, dengan indikator serta target kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta dengan target pada tahun 2020 sebesar 107,8 triliun rupiah.

b. Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan target indeks pada tahun 2020 sebesar 88,5
c. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online dengan target pada tahun 2020 sebesar 100 persen.

Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Peningkatan Penanaman Modal						**Peningkatan Penanaman Modal**					
1	Pelaksanaan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Provinsi DKI Jakarta	Tercapainya jenis peraturan/kebijakan yang disusun dan/atau disempurnakan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan	5 Jenis	1.512.270.300	Pelaksanaan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Provinsi DKI Jakarta	Tercapainya jenis peraturan/kebijakan yang disusun dan/atau disempurnakan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan	5 Jenis	1.356.327.330	
2	Pelaksanaan Assesment Reform Indikator EoDB Pemprov DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Tercapainya Pelaksanaan Assesment Reform EoDB	107,8 Triliun	500.000.000	Pelaksanaan Assesment Reform Indikator EoDB Pemprov DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Tercapainya Pelaksanaan Assesment Reform EoDB	107,8 Triliun	0	Tujuan pelaksanaan assesment adalah untuk membandingkan rangking EoDB yang dibuat oleh World Bank dengan kondisi perbaikan layanan perizinan yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini dihapuskan dikarenakan DPMPTSP tidak lagi berfokus pada pencapaian rangking EoDB namun lebih mengutamakan pada reformasi perizinan yang dilakukan.
3	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Provinsi DKI Jakarta	Tercapainya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	100%	5.000.000.000	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Provinsi DKI Jakarta	Tercapainya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	100%	866.047.600	Efisiensi anggaran dikarenakan pada Tahun 2020 berfokus pada pelaksanaan Bussiness Forum serta promosi dalam negeri.
4	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik	Provinsi DKI Jakarta	Tercapainya Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Online	100%	15.188.144.700	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik	Provinsi DKI Jakarta	Tercapainya Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Online	100%	0	Kegiatan dipindahkan di program peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Penyelenggaraan Jakarta Investment Center	Provinsi DKI Jakarta	Terselenggaranya Pelaksanaan Jakarta Investment Center	100%	2.445.266.750	Penyelenggaraan Jakarta Investment Center	Provinsi DKI Jakarta	Terselenggaranya Pelaksanaan Jakarta Investment Center	100%	2.211.406.000	
						Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Tersusunnya Bahan Promosi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	100%	2.115.000.000	Penyusunan bahan promosi termasuk strategi promosi didalamnya
Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu						**Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu**					
6	Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Provinsi DKI Jakarta	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	88%	600.000.000	Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Provinsi DKI Jakarta	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	88%	757.187.704	
7						Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik	Provinsi DKI Jakarta	Tercapainya Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Online	100%	15.188.144.700	

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi, lembaga penelitian, akademisi maupun dari perangkat daerah dari Provinsi hingga kabupaten/kota yang disampaikan secara langsung maupun melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang pelaksanaanya dimulai dari tingkat RW sampai dengan tingkat Provinsi.

Seluruh data aspirasi dan usulan masyarakat yang disampaikan melalui proses Musrenbang telah difasilitasi melalui sistem teknologi informasi yang dapat diakses melalui portal musrenbang.jakarta.go.id. Berdasarkan penarikan data pada sistem tersebut terdapat satu usulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	POS PTSP Pulau Sabira	Pulau Sabira Kelurahan Pulau Harapan, Kabupaten Adm. Kepualauan Seribu	unit	1	pelayanan sangat dibutuhkan mengingat letak pulau yang sangat jauh

Sumber: musrenbang.jakarta.go.id (diolah)

F. PENELAAHAN HASIL RESES DPRD

Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Hal ini merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Tujuan reses untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Seluruh data hasil reses dapat diakses melalui portal musrenbang.jakarta.go.id. Berdasarkan penarikan data pada sistem tersebut

hasilreses yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan rencana tindaklanjutnya dapat dilihat pada tabel hasil Reses dan rencana tindaklanjut.

Tabel 2. 7 Hasil Reses Dan Rencana Tindaklanjut

No	Kode Tracking	Nama Dewan	Isi Pesan	Kelompok Pesan	Tindaklanjut
1	RS595152	Jhonny Simanjuntak SH	menyampaikan PTSP kurang berfungsi dengan baik, lamban dalam pengurusan KTP.	Pengaduan	Diteruskan ke Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat untuk ditindaklajuti
2	RS024456	H. Fajar Sidik	Warga mengharapkan tidak ada lagi yang mempersulit untuk membuat surat menyurat di PTSP.	Pengaduan	Diteruskan ke Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat untuk ditindaklajuti
3	RS476976	Taufiqurrahman SH	"c. Program Pelayanan PTSP Mengenai Program Pelayanan melalui PTSP, peserta Kegiatan Reses Kelurahan Cikini menilai sudah cukup baik dan sangat membantu warga masyarakat karena cepat, mudah dan bebas biaya. Ada beberapa usulan terkait Program Pelayanan PTSP yang disampaikan oleh peserta, meliputi :"	Apresiasi	
4	RS477052	Taufiqurrahman SH	• Kiranya Program Pelayanan PTSP jadwalnya diperpanjang sehingga dapat melayani kebutuhan warga pada hari Sabtu, mengingat banyak juga kepentingan yang bersifat mendadak dan urgent.	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"
5	RS477071	Taufiqurrahman SH	• Kiranya mesin antrian pelayanan PTSP di lingkup Kelurahan benar-benar di rawat dan diperhatikan agar dapat terus berfungsi dengan baik. Pelayaan di PTSP terkadang sedikit semrawut manakala mesin antrian mengalami kerusakan, sehingga pelayanan antrian bersifat manual.	Usulan	Akan diakomodir kegiatan "Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja"
6	RS483856	H. Fajar Sidik	Warga mengharapkan tidak ada lagi yang mempersulit untuk membuat surat menyurat di PTSP .	Pengaduan	Diteruskan ke Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat untuk ditindaklajuti

No	Kode Tracking	Nama Dewan	Isi Pesan	Kelompok Pesan	Tindaklanjut
7	RS597265	Hj. Neneng Hasanah SE, S.IP	Adanya keluhan masyarakat tentang kurangnya pelayanan di PTSP yang kurang baik untuk itu mohon perhatian Pemda DKI Jakarta dan juga masih banyak sampah di selokan/parit sehingga menimbulkan gangguan saluran air serta dapat menimbulkan banjir. Hal ini juga dapat menyebabkan bersarangnya nyamuk dan bau tidak sedap.	Pengaduan	Diteruskan ke Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat untuk ditindaklajuti
8	RS734687	H. Bimo Hastoro S.IP	2. Agar lebih dipermudah mengurus izin operasional PAUD di PTSP Kelurahan, karena PAUD yang didrikan warga sifatnya sosial bukan bisnis.	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"
9	RS253052	Johan Musyawa SE	Belakangan ini pelayanan PTSP di Kelurahan Kalisari khususnya E-KTP sangat terganggu dengan kondisi yang ada, hampir 6 bulan bahkan ada yang lebih warga mengurus sampai dengan hari ini belum jadi, memang situasi ini tidak hanya terjadi di Jakarta saja hampir di semua daerah untuk layanan E-KTP bermasalah, tolong sampaikan kepada Pemerintah Pusat yang lebih berkompeten agar masalah E-KTP dapat segera dibereskan.	Usulan	Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan terus ditingkatkan
10	RS264814	Ong Yenny	1. Warga mengeluhkan susahnya mengurus perijinan usaha di PTSP Kelurahan.	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"
11	RS341393	Syarif M.Si	1. Permohonan agar diberikannya pelatihan pelayanan bagi seluruh pegawai PTSP I.	Usulan	Akan diakomodir kegiatan "Bimbingan Teknis Regulasi Teknis"

No	Kode Tracking	Nama Dewan	Isi Pesan	Kelompok Pesan	Tindaklanjut
12	RS342594	H. Dite Abimanyu Ak, MM	Mendukung Pemprov untuk membuka lanyanan PTSP pada hari Sabtu.	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"
13	RS343666	H. Dite Abimanyu Ak, MM	Penambahan staf PTSP dapat memudahkan pengurusan pembuatan ijin- ijin maupun Kartu Keluarga (KK)	Usulan	Akan dilakukan kordinasi dengan BKD mengingat kewenangan penambahan SDM dilingkungan DPMPTSP menjadi kewenangan BKD
14	RS343680	H. Dite Abimanyu Ak, MM	Mohon dipenambahan Jam Pelayanan PTSP.	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"
15	RS404688	Mayjen TNI (Purn) H. Ferrial Sofyan	Mohon Pemerintah Provinsi melalui PTSP dapat memudahkan pengurusan Administrasi, Pelayanan PTSPsangat dibutuhkan warga dibuka layanan pada hari sabtu/Minggu	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"
16	RS407119	Dwi Ratna SE., MM	Agar dipermudah dalam pengurusan administrasi apapun di PTSP Kelurahan, (Warga RT 004/003 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung)	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"
17	RS599770	H. Bimo Hastoro S.IP	24. Agar lebih dipermudah mengurus izin operasional PAUD di PTSP Kelurahan, karena PAUD yang didrikan warga sifatnya sosial bukan bisnis.	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan

No	Kode Tracking	Nama Dewan	Isi Pesan	Kelompok Pesan	Tindaklanjut
					"Peningkatan Kualitas Pelayanan"
18	RS600317	Mayjen TNI (Purn) H. Ferrial Sofyan	5. Mohon Pemerintah Provinsi melalui PTSP dapat memudahkan pengurusan Administrasi, Pelayanan PTSPsangat dibutuhkan warga dibuka layanan pada hari sabtu/Minggu	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"
19	RS631079	Dwi Wijayanto Rio Sambodo SE., MM	39. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hendaknya memasukkan Program Serifikasi ke dalam program PTSP	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"
20	RS689471	Johan Musyawa SE	Terkait layan PTSP yang ada di kelurahan Baru Pak Johan secara umum memang sudah baik, namun masih perlu ada ke Disipilinan terhadap jam kerja kantor. Saya pernah dateng kekelurahan Baru untuk mengurus surat keterangan domisili jam 09.00 tapi pegawainnya belum pada siap dengan alasan mereka baru sampai di kantor, setahu saya jam kerja yaang ada itu mulai jam 08.00 smp jam 16.00 dan pada saat itu memang pegawai PTSP kelurahan langsung meminta maaf, tapi menrut saya jika ini di biarkan terus menerus tanpa adanya penegakan dispilin, hal ini dapat merugikan masyarakat.	Pengaduan	Diteruskan ke Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat untuk ditindaklajuti
21	RS690286	H. Achmad Yani S.IP., M.Pd	PAUD yang belum mendapatkan izin dari PTSP meminta untuk dibuatkan izinnya.	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan

No	Kode Tracking	Nama Dewan	Isi Pesan	Kelompok Pesan	Tindaklanjut
					"Peningkatan Kualitas Pelayanan"
22	RS692695	Syarif M.Si	1. Permohonan agar diberikannya pelatihan pelayanan bagi seluruh pegawai PTSP I.	Usulan	Akan diakomodir kegiatan "Bimbingan Teknis Regulasi Teknis"
23	RS749765	Syarif M.Si	1. Permohonan agar diberikannya pelatihan pelayanan bagi seluruh pegawai PTSP I.	Usulan	Akan diakomodir kegiatan "Bimbingan Teknis Regulasi Teknis"
24	RS761327	H. Dite Abimanyu Ak, MM	8. Mendukung Pemprov untuk terus mengupayakan realisasi pembuatan taman-taman terbuka hijau baik RPTRA atau taman kota sebagai sarana komunikasi antar warga maupun untuk penghijauan 9. Mendukung Inventarisasi asset pemda 10. Mendukung Pemprov melakukan penormalisasi Kali dan pemukiman 11. Mendukung perluasan wilayah ruang terbuka hijau 12. Mendukung Pemprov untuk lebih memperhatikan guru-guru PAUD, dan Kader Posyandu dengan memberikan insentif 13. Mendukung Pemprov menigkatkan Dana Operasional bagi Kader Jumantik, Posyandu, PKK, dan Guru Paud 14. Untuk memudahkan pengurusan surat-surat kependudukan agar dukcapil dengan PTSP dapat bersinergi 15. Mendukung agar Program Oke Oce dapat dipadukan dengan Program dari dinas koperasi dan UMKM 16. Mendukung Rencana Pemda melepas saham PT. Delta 17. Pendukung Pemda melalui BUMD memperbanyak pembangunan perumahan dengan program DP 0% 18. Memdukung Pemprov mempunyai tempat pembuangan sampah akhir sendiri, dengan system yang	Usulan	Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan terus ditingkatkan

No	Kode Tracking	Nama Dewan	Isi Pesan	Kelompok Pesan	Tindaklanjut
			canggih 19. Mendukung Pemprov membangun RPTRA dilengkapi dengan fasilitas olah raga, jogging track		
25	RS761404	H. Dite Abimanyu Ak, MM	34. Mendukung Pemprov menambah insentif operasional Rt dan RW 35. Mendukung Pemprov untuk membuka lanyanan PTSP pada hari Sabtu 36. Mendukung Program Prona (sertifikasi tanah)	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"
26	RS763512	Abdul Canter Sangaji S. Sos	Ibu Haryati ketua RT 05 saya mempertanyakan kinerja PTSP yang sangat buruk di wilayah kami pak. Keluhan warga kami: a. Pengursan KTP yang sulit dan lama b. Pengurusan KK yang lama c. Minta tanda tangan lurah bertele tele d. Surat pindah ngurus pun lama pak	Usulan	Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan terus ditingkatkan
27	RS015179	Jhonny Simanjuntak SH	1. Pelayanan PTSP selalu dilempar-lempar.	Pengaduan	Diteruskan ke Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat untuk ditindaklajuti
28	RS043279	H. Fajar Sidik	1. Warga Masyarakat Memohon kepada Pemerintah Provinsi DKI agar lebih diperhatikan lagi, program keagamaan yang ada dilingkungan kelurahan se Jakarta pusat. 2. Apakah ada lembaga Khusus yang membantu untuk kegiatan Majelis Taklim di Jakarta Pusat. 3. Warga masyarakat sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,agar dapat membantu ketika majelis Taklim dalam mengadakan kegiatan Hari Besar Islam (MUHARRAM,MAULID NABI MUHAMMAD SWA) dan lain-lain. 5. Pelayanan PTSP agar dipermudah disetiap	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"

No	Kode Tracking	Nama Dewan	Isi Pesan	Kelompok Pesan	Tindaklanjut
			Kelurahan yang ada di Jakarta Pusat.		
29	RS398305	H. Dite Abimanyu Ak, MM	1. Perluasan ruang tunggu PTSP Kelurahan	Usulan	Akan dikordinasikan dengan walikota dan kelurahan terkait karena terkait dengan pengelolaan aset bangunan yang tercatat di tingkat kota.
30	RS399666	H. Dite Abimanyu Ak, MM	1. Untuk memudahkan pengurusan surat-surat kependudukan agar dukcapil dengan PTSP dapat bersinergi	Usulan	Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan terus ditingkatkan
31	RS400061	H. Dite Abimanyu Ak, MM	2. Mendukung peningkatan pelayanan PTSP dengan meningkatkan system dan fasilitas komputerisasi	Usulan	Akan diakomodir kegiatan "Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja"
32	RS400589	H. Dite Abimanyu Ak, MM	3. Mendukung Pemprov untuk membuka lanyanan PTSP pada hari Sabtu dan malam hari	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"
33	RS401433	H. Dite Abimanyu Ak, MM	1. Penambahan staf PTSP dapat memudahkan pengurusan pembuatan ijin- ijin maupun Kartu Keluarga (KK)	Usulan	Akan dilakukan kordinasi dengan BKD mengingat kewenangan penambahan SDM dilingkungan DPMPTSP menjadi kewenangan BKD
34	RS401455	H. Dite Abimanyu Ak, MM	2. Sinergi antara Dukcapil dan PTSP dalam Pelayanan	Usulan	Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan terus ditingkatkan
35	RS401482	H. Dite Abimanyu Ak, MM	3. Mohon dipenambahan Jam Pelayanan PTSP	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"

No	Kode Tracking	Nama Dewan	Isi Pesan	Kelompok Pesan	Tindaklanjut
36	RS490372	H. Dite Abimanyu Ak, MM	1. Mendukung PTSP guna peningkatan dilakukan pelayanan pada hari sabtu dan malam hari	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"
37	RS491472	H. Dite Abimanyu Ak, MM	Mendukung pelayanan PTSP secara On line	Apresiasi	DPMPTSP terus berkomitmen untuk mengembangkan layanan secara online diantaranya melalui pengembangan JakEvo
38	RS491821	Syarif M.Si	1. kemudahan dalam proses pelayanan IMB di kantor PTSP setempat karena memakan waktu yang cukup lama	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"
39	RS491843	Syarif M.Si	2. Permohonan agar pelayanan dalam pengurusan surat-surat kematian agar di prioritaskan dalam PTSP yang ada	Usulan	Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan terus ditingkatkan
40	RS837007	Dwi Wijayanto Rio Sambodo SE., MM	15. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hendaknya memasukkan Program Serifikasi ke dalam program PTSP	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"
41	RS894672	Hj. Neneng Hasanah SE, S.IP	4. Adanya keluhan masyarakat tentang kurangnya pelayanan di PTSP yang kurang baik untuk itu mohon perhatian Pemda DKI Jakarta dan juga masih banyak sampah di selokan/parit sehingga menimbulkan gangguan saluran air serta dapat menimbulkan banjir. Hal ini juga dapat menyebabkan bersarangnya nyamuk	Pengaduan	

No	Kode Tracking	Nama Dewan	Isi Pesan	Kelompok Pesan	Tindaklanjut
42	RS005668	Mayjen TNI (Purn) H. Ferrial Sofyan	3. Mohon Pemerintah Provinsi melalui PTSP dapat memudahkan pengurusan pembuatan Kartu Keluarga (KK) atau yg lain nya, Pelayanan PTSP sangat dibutuhkan warga dibuka layanan pada hari sabtu/Minggu.	Usulan	Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan terus ditingkatkan
43	RS005998	Mayjen TNI (Purn) H. Ferrial Sofyan	3. Mohon Pemerintah Provinsi melalui PTSP dapat memudahkan pengurusan administrasi, Pelayanan PTSPsangat dibutuhkan warga dibuka layanan pada hari sabtu/Minggu.	Usulan	Akan dilakukan pengkajian terhadap usulan penambahan jam/hari kerja dan kegiatan kajian menjadi salah satu output dari kegiatan "Peningkatan Kualitas Pelayanan"
44	RS650225	Hj. Yusriah Dzinnun S.Pd	Tokoh Masyarakat mempertanyakan masih adanya oknum di pelayanan satu pintu yang meminta dana diluar prosudural.	Pengaduan	Diteruskan ke Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat untuk ditindaklajuti
45	RS490780	H. Dite Abimanyu Ak, MM	1. Mendukung sistem pelayanan satu pintu untuk mendorong kecepatan, transparansi dan keterukuran	Apresiasi	Terhadap apresiasi yang diberikan akan menjadi motivasi bagi DPMPTSP untuk

Sumber: musrenbang.jakarta.go.id.(diolah)

Jumlah usulan reses periode 1, 2 dan 3 tahun 2018 yang ditujukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 45. Dari 45 pesan reses tersebut jika dikelompokan terdiri dari 3 bersifat apresiasi, 8 bersifat pengaduan dan 34 bersifat usulan. Terhadap pesan yang bersifat apresiasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengucapkan terimakasih dan akan dijadikan motivasi dalam pengambilan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Sedangkan 8 pesan reses yang bersifat pengaduan akan dikordinasikan dengan Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Terhadap 34 pesan reses yang bersifat usulan berikut tindak lanjut yang diambil:

a. 10 pesan reses terkait usulan penambanahan dan atau jam kerja, akan dilakukan telaah kebijakan melalui kegiatan “Peningkatan Kualitas Pelayanan”.
b. 9 pesan reses terkait usulan kemudahan dan pengembangan perijinan, akan dilakukan telaah kebijakan melalui kegiatan “Peningkatan Kualitas Pelayanan”.
c. 5 pesan reses terkait penambahan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), akan dilakukan kordinasi lebih lanjut dengan BKD terkait penambahan SDM dan terkait dengan peningkatan kualitas SDM akan diakomodir melalui kegiatan "Bimbingan Teknis Regulasi Teknis" dan “Pelaksanaan Capacity Building Pegawai DPMPTSP”
d. 7 pesan reses terkait peningkatan sinergitas dengan layanan Kependudukan. Terkait hal ini akan ditingkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
e. 3 pesan reses terkait peningkatan sarana prasaran dan akan ditindaklanjuti dengan penyediaan sarana sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020

Melanjutkan pendekatan yang telah dimulai sejak RKP 2017, penyusunan RKP 2020 juga berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2020 tema utama adalah, **"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"** yang dijabarkan ke dalam lima Prioritas Nasional (PN). Holistik, mengandung arti bahwa tematik dari program Presiden dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan. Integratif, berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya menuju keterpaduan berbagai sumber pembiayaan. Spasial, yang berarti bahwa kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2020 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional yaitu:

(1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
(2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
(3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
(4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan
(5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Kelima Prioritas Nasional tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa Program Prioritas yang masing-masing dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Kegiatan Prioritas.

Merujuk kepada lima prioritas tersebut, terdapat yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta selaku pengemban urusan Penanaman Modal yakni **Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja**. Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital. Untuk mencapai sasaran tersebut, beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu ditangani pada tahun 2020 yaitu masih terbatasnya kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lambatnya transformasi struktural, rendahnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, tingginya defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan belum terbangunnya ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja akan dilakukan melalui 5 Program Prioritas (PP) yaitu:

(1) Penguatan Kewirausahaan dan UMKM;
(2) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi;
(3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja;
(4) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
(5) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Adapun peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dalam Program Prioritas yakni dalam **Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi.** Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi akan dilaksanakan melalui 8 Kegiatan Prioritas, yaitu:

(1) Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir;
(2) Peningkatan industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir;
(3) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah industri non-agro yang didukung sistem bisnis terintegrasi hulu-hilir;

(4) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
(5) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital;
(6) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi;
(7) Peningkatan hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; dan
(8) Pengembangan industri halal dan produk sehat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta turut serta terlibat dengan Kegiatan Prioritas no 6 yakni **Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi** yang didalamnya memuat sasaran kegiatan **meningkatnya peringkat kemudahan berusaha dan realisasi investasi PMA dan PMDN** dengan indikator kegiatan yakni perangkat DPMPTSP yang mengikuti diklat teknis OSS, sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang terstandardisasi, implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Strategi kebijakan EoDB dan Peningkatan Daya Saing, Rekomendasi kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha, peta potensi dan peluang investasi daerah, pemutakhiran data potensi investasi daerah, fasilitasi penyelesaian masalah investasi.

2. Kebijakan Kemudahan Berusaha

Upaya meningkatkan peringkat ease of doing business (EODB) pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk melakukan perbaikan peringkat melalui deregulasi peraturan memulai berusaha. Kondisi eksisting EODB 2018 prosedur perizinan mencakup 11 prosedur dengan lama waktu 23 hari. Usulan EODB tahun 2019 prosedur perizinan hanya menjadi 4 prosedur, waktu pengurusan hanya 5 hari. Pelaksanaan percepatan berusaha dilakukan pemerintah melalui 2 tahap yaitu:

- Tahap 1 meliputi:
  a. Pembentukan satgas K/L
  b. Penerapan sistem checklist di KEK, FTZ, Kawasan industry, Kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yang telah beroperasi
  c. Penerapan data sharing untuk perizinan
- Tahap 2 meliputi:
  a. Reformasi regulasi di Pusat dan Daerah

b. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS)
c. Penyusunan arsitektur dan peta jalan OSS
d. Uji coba sistem

Tahap dua ini dilakukan secara pararel dengan tahap 1. Pada dasarnya kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha (Perpres No.9 /2017) dilakukan dengan mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui:

a. penerapan sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS)
b. Memberikan fasilitas sistem *checklist* (hutang perizinan) di kawasan-kawasan ekonomi.
c. Menerapkan sistem *data sharing*

Untuk menjaga efektivitas dan kepastian pelaksanaan berusaha dibentuk satgas-satgas (*leading sector* dan pendukung) di K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mengawal dan membantu menyelesaikan perizinan berusaha dan untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha dilakukan reformasi regulasi. Semua pelayanan perizinan berusaha hanya dilakukan melalui PTSP (BKPM, DPM-PTSP Provinsi, dan DPM-PTSP Kabupaten/Kota), sehingga kewenangan yang belum ada atau belum didelegasikan kepada PTSP, tetap hanya diurus lewat PTSP yang dikawal dan dibantu penyelesaiannya oleh Satgas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota).

3. Kebijakan Mal Pelayanan Publik

Kebijakan pemerintah pusat terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu Gedung pelayanan. Saat ini penyelenggaraan MPP diatur dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pembentukan MPP ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pelayanan terpadu yang telah dikembangkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih baik.

Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 tahun 2017, tujuan pembentukan MPP antara lain untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, di mana MPP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan.

MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan ruang lingkup meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.

Sejalan dengan kebijakan nasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi DKI Jakarta telah membangun Mal Pelayanan Publik sejak tahun 2017 dan akan dikembangkan secara terus menerus dan berkelanjutan.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 merujuk kepada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Di mana tujuannya adalah mendukung tercapainya Misi ke-2 dan ke-3 RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2020, secara berurutan yaitu misi 2 “Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis serta perbaikan pengelolaan tata ruang” dan misi 3 “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani serta meyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas”. Sehingga tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta seperti yang terdapat dalam table berikut

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan investasi di DKI Jakarta	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi investasi (Triliun rupiah)	107,8
2	Meningkatnya Kualitas layanan Perizinan dan Non perizinan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online.	1. Indeks kepuasan masyarakat	88,5
			2. Persentase Layanan Perizinan dan	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Non Perizinan secara online	
			3. Indeks Kepuasan Layanan Kantor	4
			4. Indeks Kepuasan Kendaraan Dinas Operasional	4

Sumber: Renstra DPMPTSP Prov. DKI Jakarta 2017 - 2022

Definisi operasional dari indikator dalam tujuan dan sasaran renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah:

1. Realisasi investasi

   Realisasi investasi adalah Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM.

2. Indeks kepuasan masyarakat

   Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

3. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online

   Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online adalah jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan secara online dibandingkan dengan seluruh jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan.

4. Indeks Kepuasan Layanan Kantor

   Indeks kepuasan pelayanan kantor berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev. Indeks 1 = 0-25%, Indeks 2 = >25%-50%, Indeks 3 = >50%-75%, Indeks 4 = >75%-100%.

5. Indeks Kepuasan Kendaraan Dinas Operasional

Indeks kepuasan pelayanan KDO berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev. Indeks 1 = 0-25%, Indeks 2 = >25%-50%, Indeks 3 = >50%-75%, Indeks 4 = >75%-100%

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 berbeda dengan yang digunakan sebelumnya. Sebab, Renja 2018 adalah Renja peralihan yang berpedoman kepada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dan RPJMD 2017-2022 belum mulai disusun.

Pada Renja 2020 menggunakan program yang terdapat di Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 terdiri 2 program utama dan 2 program operasional. Program tersebut yakni:

1. Program Peningkatan Penanaman Modal
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Program Peningkatan Dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal
4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 berserta rencana pendanaannya terdapat dalam Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang menampilkan program, kegiatan, dan rencana anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Pada tahun ini terdapat 4 program dan 79 kegiatan. Terdapat 5 kegiatan baru yang tidak ada di dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, 7 kegiatan adalah Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Kegiatan pendukung KSD berdasarkan Kepgub Nomor 1042 tahun 2018 tentang daftar Kegiatan Strategis Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yaitu KSD no 17 “Peningkatan Peringkat Ease Of Doing Business (EODB)” dan no 18 “Optimalisasi Mal Pelayanan Publik melalui pembentukan Jakarta Investment

Centre dan Starting Business Corner". Penjelasan secara rinci terdapat dalam Tabel berikut (data anggaran berdasarkan tarikan sistem apbd.jakarta.go.id)

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

SKPD/UKPD : 11801000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Program	Kegiatan		Program	Kegiatan				Program	Kegiatan	
2				**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**											
2	**12**			**Penanaman Modal**						**189,432,257,907**					**19,025,112,568**
2	**12**	**01**		**Program Peningkatan Penanaman Modal**						**7,701,650,620**					**0**
2	12	01	001	Pelaksanaan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Tercapainya jenis peraturan/kebijakan yang disusun dan/atau disempurnakan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan	Provinsi DKI Jakarta	107.8 Triliun	5 Jenis	1,356,327,330	PAD	KSD	115.9 Triliun		0
2	12	01	002	Pelaksanaan Assesment Reform Indikator EoDB Pemprov DKI Jakarta	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Tercapainya Pelaksanaan Assesment Reform EoDB	Provinsi DKI Jakarta	107.8 Triliun	100 %	0	PAD		115.9 Triliun		0
2	12	01	003	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Tercapainya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Provinsi DKI Jakarta	107.8 Triliun	100 %	866,047,600	PAD	KSD	115.9 Triliun		0
2	12	01	004	Penyelenggaraan Jakarta Investment Center	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Terselenggaranya Pelaksanaan Jakarta Investment Center	Provinsi DKI Jakarta	107.8 Triliun	100 %	2,211,406,000	PAD	KSD	115.9 Triliun		0
2	12	01	006	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian penanaman modal	Provinsi DKI Jakarta	107.8 Triliun	5 laporan	349,096,990	PAD		115.9 Triliun		0
2	12	01	008	Persiapan dan Penyiapan Proyek Infrastruktur	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman	Jumlah proyek dan atau potensi proyek yang disiapkan	Provinsi DKI Jakarta	107.8 Triliun	4 Proyek	803,772,700	PAD		115.9 Triliun		0

				Strategis Daerah yang akan Dikerjasamakan dengan Badan Usaha	Modal di Provinsi DKI Jakarta										
2	12	01	009	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Tersusunnya Bahan Promosi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	107.8 Triliun	1 Bahan	2,115,000,000	PAD	KSD	115.9 Triliun		0
2	**12**	**02**		**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu**						**125,012,343,948**					**19,025,112,568**
2	12	02	001	Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	88%	757,187,704	PAD	KSD	90 indeks		0
2	12	02	002	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	88,5 indeks	0	PAD		90 indeks		0
2	12	02	003	Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah ISO yang diterapkan	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	1 ISO	303,235,400	PAD		90 indeks		0
2	12	02	004	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Regulasi Teknis	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah pegawai mengikuti bimbingan teknis	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	600 pegawai	626,594,000	PAD		90 indeks		0
2	12	02	006	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah personil Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	200 orang	17,932,773,959	PAD		90 indeks		0
2	12	02	007	Penyediaan Jasa Petugas Customer Relation Officer	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Petugas Customer Relation Officer	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	300 orang	26,103,267,089	PAD		90 indeks		0
2	12	02	008	Penyediaan Jasa dan Pendukung Penerbitan Rekomendasi	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan	Tercapainya Jumlah jenis bidang perizinan	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	1 bidang	24,752,796	PAD		90 indeks		0

				Bidang Pertanahan	Terpadu Satu Pintu										
2	12	02	009	Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan dan Non Perizinan	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tercapainya Jumlah rumpun Izin dan non izin	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	4 rumpun	0	PAD		90 indeks		0
2	12	02	010	Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	terlaksananya pelayanan izin Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	100 %	34,233,887,185	PAD		90 indeks		0
2	12	02	011	Pengelolaan Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tercapainya Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	100 %	638,800,000	PAD		90 indeks		0
2	12	02	012	Pengelolaan Call Center	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tercapainya Waktu pengelolaan call center	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	12 bulan	5,946,625,098	PAD		90 indeks		0
2	12	02	013	Pelaksanaan Komunikasi Masyarakat Secara Terpadu	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tercapainya Rasio Berita Positif Terhadap Pelayanan DPMPTSP	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	8,5 rasio	3,622,276,171	PAD		90 indeks		0
2	12	02	014	Penyediaan Jaringan Internet Pendukung Untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	Tercapainya Jumlah lokasi pelayanan yang disediakan jaringan internet	Provinsi DKI Jakarta	0 %	324 lokasi	4,383,689,864	PAD		0 %		0
2	12	02	015	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	Tercapainya Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Online	Provinsi DKI Jakarta	0 %	100%	11,216,478,400	PAD	KSD	0 %		0
2	12	02	016	Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat	Jumlah rumpun Izin dan non izin	Provinsi DKI Jakarta	0 %	4 rumpun	17,163,663,714	PAD		0 %		18,266,000,000
2	12	02	017	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat	Provinsi DKI Jakarta	0 %	88,5 indeks	2,059,112,568	PAD	KSD	0 %		759,112,568

2	**12**	**03**		**Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal**						**54,445,169,559**						**0**
2	12	03	001	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya indeks kepuasan pelayanan kantor	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	100 %	2,897,957,712	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	002	Penyediaan jasa administrasi keuangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	20,322,500	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	003	Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Jumlah pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	3 kali	168,766,620	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	005	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Waktu pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	183,988,893	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	006	Penyediaan alat tulis kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Waktu penyediaan alat tulis kantor	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	3,542,623,711	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	8,956,505,360	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	008	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	35 orang	1,982,855,105	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	009	Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	55 orang	2,978,800,731	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	010	Penyediaan makanan dan minuman	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	1.144.866.540	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	011	Penyediaan sewa mesin fotokopi	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Penyediaan sewa mesin foto copy	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	12,362,328,000	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	012	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	100%	13,414,078,997	PAD	Mengakomodir Hasil Usulan Langsung	4 Indeks			0
2	12	03	013	Penyediaan jasa dan pengadaan	indeks kepuasan	Tercapainya Penyediaan jasa dan	Provinsi DKI	4 Indeks	12 bulan	1,916,384,109	PAD		4 Indeks			0

				perlengkapan keamanan kantor	pelayanan kantor	pengadaan perlengkapan keamanan kantor	Jakarta								
2	12	03	014	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	1,841,958,603	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	015	Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Lift Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Lift Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	636,436,400	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	016	Penyediaan Jasa Pembuangan Sampah	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pembuangan Sampah	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	24,000,000	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	017	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	100%	25,314,300	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	018	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Taman Kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Taman Kantor	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	0	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	019	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC ME dan Genset Kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC ME dan Genset Kantor	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	2,105,212,913	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	020	Pemeliharaan Gedung Kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	242,769,065	PAD		4 Indeks		0
2	**12**	**04**		**Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal**						**2,273,093,780**					**0**
2	12	04	001	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Tersedianya Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	1,065,772,550	PAD		4 Indeks		0
2	12	04	002	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Tersedianya Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	1 tahun	76,252,700	PAD		4 Indeks		0
2	12	04	003	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Jumlah KDO/KDO Khusus yang dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	362 unit	1,131,068,530	PAD		4 Indeks		0

SKPD/UKPD : 11801101 UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Program	Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Program	Kegiatan				Program	Kegiatan	
2				**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**											
2	**12**	**03**		**Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal**						**5,866,553,141**					**0**
2	12	03	001	Penyediaan alat tulis kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Indeks	1 Tahun	1,903,929,445	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	002	Penyediaan makanan dan minuman	indeks kepuasan pelayanan kantor	tersedianya makan dan minum	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Indeks	12 bulan	486,219,140	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	003	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	indeks kepuasan pelayanan kantor	tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Indeks	12 bulan	279,153,864	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	004	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	indeks kepuasan pelayanan kantor	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Indeks	12 bulan	54,338,922	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	005	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya petugas penunjang kegiatan kantor	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Indeks	12 bulan	3,141,280,770	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	006	Penyediaan jasa administrasi keuangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	tersedianya jasa administrasi keuangan	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Indeks	12 bulan	1,631,000	PAD		4 Indeks		0

SKPD/UKPD : 11801201 UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Program	Kegiatan		Program	Kegiatan				Program	Kegiatan	
2				**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**											
2	12	03	001	Penyediaan alat tulis kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terlaksananya Peningkatan dan Pengelolaan Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara	Kotamadya Jakarta Utara	4 Indeks	1 tahun	1,217,883,744	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	002	Penyediaan makanan dan minuman	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Makan Minum	Kotamadya Jakarta Utara	4 Indeks	1 Tahun	561,046,200	PAD		4 Indeks		56,565,080
2	12	03	003	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kotamadya Jakarta Utara	4 Indeks	1 Tahun	178,765,202	PAD		4 Indeks		559,781,200
2	12	03	004	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Kotamadya Jakarta Utara	4 Indeks	1 Tahun	106,086,673	PAD		4 Indeks		56,833,436
2	12	03	005	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan	Kotamadya Jakarta Utara	4 Indeks	1 Tahun	2,328,880,572	PAD		4 Indeks		2,328,880,572
2	12	03	006	Penyediaan jasa administrasi keuangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kotamadya Jakarta Utara	4 Indeks	1 Tahun	684,200	PAD		4 Indeks		0

SKPD/UKPD : 11801301 UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Program	Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Program	Kegiatan				Program	Kegiatan	
2				**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**											
2	12	03	001	Penyediaan alat tulis kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kotamadya Jakarta Barat	4 Indeks	6 Bulan	2,010,596,346	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	002	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Kotamadya Jakarta Barat	4 Indeks	1 Tahun	361,681,133	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	003	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	Kotamadya Jakarta Barat	4 Indeks	1 Tahun	3,791,200,929	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	004	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kotamadya Jakarta Barat	4 Indeks	1 Tahun	187,889,625	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	005	Penyediaan makanan dan minuman	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	Kotamadya Jakarta Barat	4 Indeks	1 Tahun	750,369,370	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	006	Penyediaan jasa administrasi keuangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kotamadya Jakarta Barat	4 Indeks	1 Tahun	2,736,800	PAD		4 Indeks		0

SKPD/UKPD : 11801401 UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Program	Kegiatan		Program	Kegiatan				Program	Kegiatan	
2				**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**											
2	12	03	001	Penyediaan alat tulis kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Kebutuhan ATK Unit Pelaksana PTSP se-Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Indeks	39 jenis	799,741,903	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	002	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya kebutuhan penyediaan jasa lainnya perorangan Unit Pelaksana PTSP se-Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Indeks	81 orang	4,386,961,075	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	004	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan Unit Pelaksana PTSP se-Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Indeks	12 bulan	73,503,485	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	005	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kerja Unit Pelaksana PTSP se-Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Indeks	12 bulan	82,499,153	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	006	Penyediaan makanan dan minuman	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Unit Pelaksana PTSP se-Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Indeks	12 bulan	599,752,320	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya kebutuhan penyediaan jasa administrasi keuangan Unit Pelaksana PTSP se-Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Indeks	12 bulan	1,794,100	PAD		4 Indeks		0

SKPD/UKPD : 11801501 UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Program	Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Program	Kegiatan				Program	Kegiatan	
2				**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**											
2	12	03	001	Penyediaan alat tulis kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor UP PTSP	Kotamadya Jakarta Timur	4 Indeks	1 Tahun	1,777,089,837	PAD	Mengakomodir Hasil Usulan Reses	4 Indeks		0
2	12	03	002	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Pembayaran Gaji PJLP	Kotamadya Jakarta Timur	4 Indeks	1 Tahun	4,362,061,357	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	003	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Kotamadya Jakarta Timur	4 Indeks	1 Tahun	76,584,244	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	004	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kotamadya Jakarta Timur	4 Indeks	1 Tahun	234,393,005	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	005	Penyediaan makanan dan minuman	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman	Kotamadya Jakarta Timur	4 Indeks	1 Tahun	482,516,056	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	006	Penyediaan jasa administrasi keuangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kotamadya Jakarta Timur	4 Indeks	1 Tahun	880,000	PAD		4 Indeks		0

SKPD/UKPD : 11801601 UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Program	Kegiatan		Program	Kegiatan				Program	Kegiatan	
2				**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**											
2	**12**	**02**		**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu**						**415,236,346**					**0**
2	12	02	001	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Keliling UPPTSP di Kepulauan Seribu	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Keliling UPPTSP di Kepulauan Seribu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	88.5 indeks	12 Bulan	415,236,346	PAD		90 indeks		0
2	**12**	**03**		**Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal**						**1,264,868,470**					**0**
2	12	03	001	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Indeks	12 Bulan	71,371,476	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	002	Penyediaan alat tulis kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Indeks	12 Bulan	186,014,833	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	003	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Indeks	12 Bulan	92,533,977	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	004	Penyediaan makanan dan minuman	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Pegawai dan Tamu di UPPTSP Kepulauan Seribu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Indeks	12 Bulan	77,211,746	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	006	Penyediaan Sewa Rumah Dinas UPPTSP di Wilayah Kepulauan Seribu	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Rumah Dinas UPPTSP di Wilayah Kepulauan Seribu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Indeks	12 Bulan	186,916,279	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	007	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Indeks	12 Bulan	649,920,159	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	008	Penyediaan jasa administrasi	indeks kepuasan	Tersedianya Jasa Administrasi	Kabupaten Administratif	4 Indeks	12 Bulan	900,000	PAD		4 Indeks		0

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4

Renja Perangkat Daerah

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil input pada sistem apbd.jakarta.go.id Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 terdiri dari 4 program dan 79 kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

SKPD/UKPD : 11801000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Program	Kegiatan		Program	Kegiatan				Program	Kegiatan	
2				Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar											
2	12			Penanaman Modal						189,432,257,907					19,025,112,568
2	12	01		Program Peningkatan Penanaman Modal						7,701,650,620					0
2	12	01	001	Pelaksanaan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Tercapainya jenis peraturan/kebijakan yang disusun dan/atau disempurnakan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan	Provinsi DKI Jakarta	107.8 Triliun	5 Jenis	1,356,327,330	PAD	KSD	115.9 Triliun		0
2	12	01	002	Pelaksanaan Assesment Reform Indikator EoDB Pemprov DKI Jakarta	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Tercapainya Pelaksanaan Assesment Reform EoDB	Provinsi DKI Jakarta	107.8 Triliun	100 %	0	PAD		115.9 Triliun		0
2	12	01	003	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Tercapainya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Provinsi DKI Jakarta	107.8 Triliun	100 %	866,047,600	PAD	KSD	115.9 Triliun		0
2	12	01	004	Penyelenggaraan Jakarta Investment Center	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Terselenggaranya Pelaksanaan Jakarta Investment Center	Provinsi DKI Jakarta	107.8 Triliun	100 %	2,211,406,000	PAD	KSD	115.9 Triliun		0
2	12	01	006	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian penanaman modal	Provinsi DKI Jakarta	107.8 Triliun	5 laporan	349,096,990	PAD		115.9 Triliun		0
2	12	01	008	Persiapan dan Penyiapan Proyek Infrastruktur	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman	Jumlah proyek dan atau potensi proyek yang disiapkan	Provinsi DKI Jakarta	107.8 Triliun	4 Proyek	803,772,700	PAD		115.9 Triliun		0

				Strategis Daerah yang akan Dikerjasamakan dengan Badan Usaha	Modal di Provinsi DKI Jakarta											
2	12	01	009	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Tersusunnya Bahan Promosi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	107.8 Triliun	1 Bahan	2,115,000,000	PAD	KSD	115.9 Triliun			0
2	**12**	**02**		**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu**						**125,012,343,948**						**19,025,112,568**
2	12	02	001	Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	88%	757,187,704	PAD	KSD	90 indeks			0
2	12	02	002	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	88,5 indeks	0	PAD		90 indeks			0
2	12	02	003	Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah ISO yang diterapkan	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	1 ISO	303,235,400	PAD		90 indeks			0
2	12	02	004	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Regulasi Teknis	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah pegawai mengikuti bimbingan teknis	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	600 pegawai	626,594,000	PAD		90 indeks			0
2	12	02	006	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah personil Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	200 orang	17,932,773,959	PAD		90 indeks			0
2	12	02	007	Penyediaan Jasa Petugas Customer Relation Officer	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Petugas Customer Relation Officer	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	300 orang	26,103,267,089	PAD		90 indeks			0
2	12	02	008	Penyediaan Jasa dan Pendukung Penerbitan Rekomendasi	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan	Tercapainya Jumlah jenis bidang perizinan	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	1 bidang	24,752,796	PAD		90 indeks			0

				Bidang Pertanahan	Terpadu Satu Pintu										
2	12	02	009	Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan dan Non Perizinan	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tercapainya Jumlah rumpun Izin dan non izin	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	4 rumpun	0	PAD		90 indeks		0
2	12	02	010	Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	terlaksananya pelayanan izin Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	100 %	34,233,887,185	PAD		90 indeks		0
2	12	02	011	Pengelolaan Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tercapainya Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	100 %	638,800,000	PAD		90 indeks		0
2	12	02	012	Pengelolaan Call Center	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tercapainya Waktu pengelolaan call center	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	12 bulan	5,946,625,098	PAD		90 indeks		0
2	12	02	013	Pelaksanaan Komunikasi Masyarakat Secara Terpadu	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tercapainya Rasio Berita Positif Terhadap Pelayanan DPMPTSP	Provinsi DKI Jakarta	88.5 indeks	8,5 rasio	3,622,276,171	PAD		90 indeks		0
2	12	02	014	Penyediaan Jaringan Internet Pendukung Untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	Tercapainya Jumlah lokasi pelayanan yang disediakan jaringan internet	Provinsi DKI Jakarta	0 %	324 lokasi	4,383,689,864	PAD		0 %		0
2	12	02	015	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	Tercapainya Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Online	Provinsi DKI Jakarta	0 %	100%	11,216,478,400	PAD		0 %		0
2	12	02	016	Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat	Jumlah rumpun Izin dan non izin	Provinsi DKI Jakarta	0 %	4 rumpun	17,163,663,714	PAD	KSD	0 %		18,266,000,000
2	12	02	017	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat	Provinsi DKI Jakarta	0 %	88,5 indeks	2,059,112,568	PAD	KSD	0 %		759,112,568

2	**12**	**03**		**Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal**						**54,445,169,559**						**0**
2	12	03	001	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya indeks kepuasan pelayanan kantor	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	100 %	2,897,957,712	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	002	Penyediaan jasa administrasi keuangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	20,322,500	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	003	Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Jumlah pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	3 kali	168,766,620	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	005	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Waktu pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	183,988,893	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	006	Penyediaan alat tulis kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Waktu penyediaan alat tulis kantor	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	3,542,623,711	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	8,956,505,360	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	008	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	35 orang	1,982,855,105	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	009	Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	55 orang	2,978,800,731	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	010	Penyediaan makanan dan minuman	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	1.144.866.540	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	011	Penyediaan sewa mesin fotokopi	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Penyediaan sewa mesin foto copy	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	12,362,328,000	PAD		4 Indeks			0
2	12	03	012	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	100%	13,414,078,997	PAD	Mengakomodir Hasil Usulan Langsung	4 Indeks			0
2	12	03	013	Penyediaan jasa dan pengadaan	indeks kepuasan	Tercapainya Penyediaan jasa dan	Provinsi DKI	4 Indeks	12 bulan	1,916,384,109	PAD		4 Indeks			0

				perlengkapan keamanan kantor	pelayanan kantor	pengadaan perlengkapan keamanan kantor	Jakarta								
2	12	03	014	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	1,841,958,603	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	015	Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Lift Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tercapainya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Lift Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	636,436,400	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	016	Penyediaan Jasa Pembuangan Sampah	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pembuangan Sampah	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	24,000,000	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	017	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	100%	25,314,300	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	018	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Taman Kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Taman Kantor	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	0	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	019	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC ME dan Genset Kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC ME dan Genset Kantor	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	2,105,212,913	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	020	Pemeliharaan Gedung Kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	242,769,065	PAD		4 Indeks		0
2	**12**	**04**		**Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal**						**2,273,093,780**					**0**
2	12	04	001	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Tersedianya Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	12 bulan	1,065,772,550	PAD		4 Indeks		0
2	12	04	002	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Tersedianya Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	1 tahun	76,252,700	PAD		4 Indeks		0
2	12	04	003	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Jumlah KDO/KDO Khusus yang dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	362 unit	1,131,068,530	PAD		4 Indeks		0

SKPD/UKPD : 11801101 UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Program	Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Program	Kegiatan				Program	Kegiatan	
2				**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**											
2	**12**	**03**		**Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal**						**5,866,553,141**					**0**
2	12	03	001	Penyediaan alat tulis kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Indeks	1 Tahun	1,903,929,445	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	002	Penyediaan makanan dan minuman	indeks kepuasan pelayanan kantor	tersedianya makan dan minum	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Indeks	12 bulan	486,219,140	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	003	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	indeks kepuasan pelayanan kantor	tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Indeks	12 bulan	279,153,864	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	004	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	indeks kepuasan pelayanan kantor	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Indeks	12 bulan	54,338,922	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	005	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya petugas penunjang kegiatan kantor	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Indeks	12 bulan	3,141,280,770	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	006	Penyediaan jasa administrasi keuangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	tersedianya jasa administrasi keuangan	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Indeks	12 bulan	1,631,000	PAD		4 Indeks		0

SKPD/UKPD : 11801201 UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Program	Kegiatan		Program	Kegiatan				Program	Kegiatan	
2				**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**											
2	12	03	001	Penyediaan alat tulis kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terlaksananya Peningkatan dan Pengelolaan Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara	Kotamadya Jakarta Utara	4 Indeks	1 tahun	1,217,883,744	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	002	Penyediaan makanan dan minuman	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Makan Minum	Kotamadya Jakarta Utara	4 Indeks	1 Tahun	561,046,200	PAD		4 Indeks		56,565,080
2	12	03	003	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kotamadya Jakarta Utara	4 Indeks	1 Tahun	178,765,202	PAD		4 Indeks		559,781,200
2	12	03	004	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Kotamadya Jakarta Utara	4 Indeks	1 Tahun	106,086,673	PAD		4 Indeks		56,833,436
2	12	03	005	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan	Kotamadya Jakarta Utara	4 Indeks	1 Tahun	2,328,880,572	PAD		4 Indeks		2,328,880,572
2	12	03	006	Penyediaan jasa administrasi keuangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kotamadya Jakarta Utara	4 Indeks	1 Tahun	684,200	PAD		4 Indeks		0

SKPD/UKPD : 11801301 UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Program	Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Program	Kegiatan				Program	Kegiatan	
2				**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**											
2	12	03	001	Penyediaan alat tulis kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kotamadya Jakarta Barat	4 Indeks	6 Bulan	2,010,596,346	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	002	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Kotamadya Jakarta Barat	4 Indeks	1 Tahun	361,681,133	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	003	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	Kotamadya Jakarta Barat	4 Indeks	1 Tahun	3,791,200,929	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	004	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kotamadya Jakarta Barat	4 Indeks	1 Tahun	187,889,625	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	005	Penyediaan makanan dan minuman	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	Kotamadya Jakarta Barat	4 Indeks	1 Tahun	750,369,370	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	006	Penyediaan jasa administrasi keuangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kotamadya Jakarta Barat	4 Indeks	1 Tahun	2,736,800	PAD		4 Indeks		0

SKPD/UKPD : 11801401 UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Program	Kegiatan		Program	Kegiatan				Program	Kegiatan	
2				**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**											
2	12	03	001	Penyediaan alat tulis kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Kebutuhan ATK Unit Pelaksana PTSP se-Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Indeks	39 jenis	799,741,903	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	002	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya kebutuhan penyediaan jasa lainnya perorangan Unit Pelaksana PTSP se-Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Indeks	81 orang	4,386,961,075	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	004	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan Unit Pelaksana PTSP se-Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Indeks	12 bulan	73,503,485	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	005	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kerja Unit Pelaksana PTSP se-Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Indeks	12 bulan	82,499,153	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	006	Penyediaan makanan dan minuman	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Unit Pelaksana PTSP se-Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Indeks	12 bulan	599,752,320	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya kebutuhan penyediaan jasa administrasi keuangan Unit Pelaksana PTSP se-Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Indeks	12 bulan	1,794,100	PAD		4 Indeks		0

SKPD/UKPD : 11801501 UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Program	Kegiatan		Program	Kegiatan				Program	Kegiatan	
2				**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**											
2	12	03	001	Penyediaan alat tulis kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor UP PTSP	Kotamadya Jakarta Timur	4 Indeks	1 Tahun	1,777,089,837	PAD	Mengakomodir Hasil Usulan Reses	4 Indeks		0
2	12	03	002	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Pembayaran Gaji PJLP	Kotamadya Jakarta Timur	4 Indeks	1 Tahun	4,362,061,357	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	003	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Kotamadya Jakarta Timur	4 Indeks	1 Tahun	76,584,244	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	004	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kotamadya Jakarta Timur	4 Indeks	1 Tahun	234,393,005	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	005	Penyediaan makanan dan minuman	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman	Kotamadya Jakarta Timur	4 Indeks	1 Tahun	482,516,056	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	006	Penyediaan jasa administrasi keuangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kotamadya Jakarta Timur	4 Indeks	1 Tahun	880,000	PAD		4 Indeks		0

SKPD/UKPD : 11801601 UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Program	Kegiatan		Program	Kegiatan				Program	Kegiatan	
2				**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**											
2	**12**	**02**		**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu**						**415,236,346**					**0**
2	12	02	001	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Keliling UPPTSP di Kepulauan Seribu	Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Keliling UPPTSP di Kepulauan Seribu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	88.5 indeks	12 Bulan	415,236,346	PAD		90 indeks		0
2	**12**	**03**		**Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal**						**1,264,868,470**					**0**
2	12	03	001	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Indeks	12 Bulan	71,371,476	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	002	Penyediaan alat tulis kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Indeks	12 Bulan	186,014,833	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	003	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	indeks kepuasan pelayanan kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Indeks	12 Bulan	92,533,977	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	004	Penyediaan makanan dan minuman	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Pegawai dan Tamu di UPPTSP Kepulauan Seribu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Indeks	12 Bulan	77,211,746	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	006	Penyediaan Sewa Rumah Dinas UPPTSP di Wilayah Kepulauan Seribu	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Rumah Dinas UPPTSP di Wilayah Kepulauan Seribu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Indeks	12 Bulan	186,916,279	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	007	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Tersedianya Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Indeks	12 Bulan	649,920,159	PAD		4 Indeks		0
2	12	03	008	Penyediaan jasa administrasi	indeks kepuasan	Tersedianya Jasa Administrasi	Kabupaten Administratif	4 Indeks	12 Bulan	900,000	PAD		4 Indeks		0

PENUTUP 5

Penutup dokumen Renja

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal untuk mendukung arah pembangunan daerah, selain itu juga dalam rangka menunjang keberhasilan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta terutama kegiatan "Peningkatan Peringkat Ease Of Doing Business (EODB)" dan "Optimalisasi Mal Pelayanan Publik melalui pembentukan Jakarta Investment Centre dan Starting Business Corner" sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2020 direncanakan melaksanakan 4 program, kegiatan dan 5 indikator kinerja. Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan perencanaan program dan kegiatan dapat lebih baik sehingga dapat membantu proses pelaksanaan kegiatan. Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020;

3. Pelaksanaan DPA Tahun 2020 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap 3 bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Renja 2021

Selanjutnya, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 akan dijabarkan ke dalam Rencana Aksi 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dalam perencaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perijinan di Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Ir. Benni Aguscandra M.Si.
NIP 196908081997031004

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C 22

1500164 pelayanan.jakarta.go.id /PelayananJakarta @layananjakarta @layananjakarta /layananjakarta